

SKRIPSI

PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TERHADAP KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

AHMAD DZAKWAN



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

SKRIPSI

PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TERHADAP KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

AHMAD DZAKWAN

A31115336



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

SKRIPSI

PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TERHADAP KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

disusun dan diajukan oleh

AHMAD DZAKWAN

A31115336

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 13 Januari 2020

Pembimbing I

Prof. Dr. Hj. Haliah, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP 19650731 199103 2 002

Pembimbing II

Prof. Dr. Hj. Kartini, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP 19650305 199203 2 002

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin




Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP 19660405 199203 2 003

SKRIPSI

PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TERHADAP KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

disusun dan diajukan oleh

AHMAD DZAKWAN
A31115336

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **30 Januari 2020** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. Hj. Haliah, S.E., M.Si., Ak., CA	Ketua	1..... 
2.	Prof. Dr. Hj. Kartini, S.E., M.Si., Ak., CA	Sekretaris	2..... 
3.	Prof. Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA	Anggota	3..... 
4.	Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si	Anggota	4..... 
5.	Drs. H. Mualimin, M.Si,	Anggota	5..... 

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP 19660405 199203 2 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

nama : Ahmad Dzakwan
NIM : A31115336
departemen/program studi : Akuntansi/Strata 1

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TERHADAP KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA.

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Makassar, 29 Januari 2020

Yang Membuat Pernyataan



Ahmad Dzakwan

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan kasih-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Indonesia”**, sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada program Strata Satu (S-1) Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Salam dan shalawat semoga senantiasa tercurah untuk nabi Muhammad SAW penunjuk segala laku dan ucap bagi umatnya.

Proses penyusunan skripsi ini dilandasi dengan penuh kesungguhan dan kesabaran serta bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan pada waktu yang tepat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin berterima kasih atas segala bantuan dan doanya kepada:

1. Kedua Orang tua peneliti. Muhammad Yasmin dan Andi Ruyani, yang peneliti sangat yakini selalu mendoakan meskipun tak pernah terlisankan.
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, M.Si., CIPM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
3. Ibu Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA dan Bapak Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., selaku Ketua Departemen dan Sekertaris Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Haliah, S.E., M.Si., Ak., CA, selaku Pembimbing I dan Ibu Prof. Dr. Hj. Kartini, S.E., M.Si., Ak., CA, selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya memberikan bimbingan hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih atas kesediaannya berbagi pengetahuan yang sangat berharga.
5. Ibu Prof. Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA, bapak Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si, dan Drs. H. Mualimin, M.Si, selaku Penguji peneliti, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan.
6. Bapak Drs. H. Abdul Rahman, MM., Ak., CA, selaku Penasehat Akademik, terima kasih atas waktu dan dorongan semangat yang telah diberikan.

7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar, terima kasih atas keikhlasannya dalam membagi pengetahuan dan waktu yang telah diberikan.
8. Pegawai Akademik, Kemahasiswaan dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar, terima kasih telah membantu peneliti dalam kelancaran urusan akademik..
9. Teman seperjuangan Yayat, Arnold, Dion, Utha, Albertus, Dede, Opik, Asraf, Ucu, Sutami, Abi, Cakra, Vien, Uci, Atiqah, Sita, Ratu, Denka, Zulfa, Dytha, Mery, Cesi, Ayu, Adel, Oca, Dinah, dan Naufi.
10. Keluarga besar Rectoverso Takbir, Tahmid, Rizal, Callu, Andry, Wito, Akhtar Indra Rara, Ema, Aniosa, Inu, Ica, Eny, Marina, Mega dan seluruh teman-teman Rectoverso yang tidak sempat disebut satuper satu. Terimakasih untuk dukungannya.
11. Teman-teman pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Ekonomi UH 2018-2020 dan pengurus Senat Mahasiswa FEB UH periode 2017-2018 serta keluarga besar KEMA FEB UH terkhusus Ikatan Mahasiswa Akuntansi (IMA).
12. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang dengan tulus memberikan semangat dan doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih atas segala doa dan bantuannya.
13. Yang terakhir kepada Sitti Nurfajriani Syam yang senantiasa meluangkan waktu dan menemani peneliti.

Semoga segala bantuan dan bimbingan dari pihak yang telah diberikan kepada peneliti dibalas dengan kebaikan dan pahala dari Allah SWT. Akhir kata, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Namun, peneliti sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti. Oleh karena itu, Kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan peneliti.

Makassar, 29 Januari 2020

Ahmad Dzakwan

ABSTRAK

Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Indonesia

The Effect of Characteristic Local Governments and the Results of Financial Audit of the Audit Board of Republic Indonesia on the Performance of Local Government in Indonesia

Ahmad Dzakwan
Haliah
Kartini

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia. Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah diukur dengan skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Indonesia (EKPPD), karakteristik pemerintah daerah diukur dengan ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja modal, *leverage*, dan ukuran legislatif, Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diukur dengan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sampel dalam penelitian ini adalah 309 pemerintah daerah yang diperoleh dengan metode *purposive sampling*. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja modal, ukuran legislatif dan opini badan pemeriksa keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia, dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia.

Kata kunci: Karakteristik pemerintah daerah, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD).

This study is aimed to examining and analyzing the effect of the characteristics of the local government and the results of financial audits of the Audit Board of Republic Indonesia (BPK) on the performance of local government in Indonesia. The performance of the local government is measured by the scores of Local Government Performance Evaluation (EKPPD), the characteristics of the local government is measured by the size of local government, the level of wealth of local government, the level of dependence on the central government, capital expenditure, leverage, and legislative size, and the results of the financial audit of the Audit Board of the Republic Indonesia (BPK) is measured by opinions given to local government. The sample in this study was 309 local government obtained by the purposive sampling method. The analysis data method used is multiple regression analysis. The analysis showed that the size of local government, the level of wealth of local government, the level of dependence on the central government, capital expenditure, and legislative size, and opinion of Audit Board of the Republic Indonesia (BPK) have a positive effect to the performance of local government in Indonesia, and leverage has no effect to the performance of local government in Indonesia.

Keyword: *The characteristics of the local government, the results of financial audit of The Audit Board of the Republic Indonesia (BPK), Local Government Performance Evaluation (EKPPD).*

DAFTAR ISI

halaman

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAN KEASLIAN	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Kegunaan Penelitian	13
1.4.1 Kegunaan Teoritis	13
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	13
1.5 Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1 Landasan Teori	16
2.1.1 Teori Agensi.....	16
2.1.2 Akuntabilitas dan Transparansi	20
2.1.3 Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) ..	22
2.1.4 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	24
2.1.5 Karakteristik Pemerintah Daerah.....	28
2.1.5.1 Ukuran Pemerintah Daerah	30
2.1.5.2 Tingkat Kekayaan Pemerintah Daerah	31
2.1.5.3 Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat.....	32
2.1.5.4 Belanja Modal.....	33
2.1.5.5 <i>Leverage</i>	35
2.1.5.6 Ukuran Legislatif.....	36
2.1.6 Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan	40
2.1.6.1 Opini Badan Pemeriksa Keuangan	41
2.2 Penelitian Terdahulu	43
2.3 Kerangka Pemikiran.....	56
2.4 Hipotesis Penelitian.....	57
2.4.1 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	57
2.4.2 Pengaruh Tingkat Kekayaan Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah..	58

2.4.3 Pengaruh Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	59
2.4.4 Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	60
2.4.5 Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	62
2.4.6 Pengaruh Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	63
2.4.7 Pengaruh Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	64
2.4.8 Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaa Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	65
BAB III METODE PENELITIAN	67
3.1 Rancangan Penelitian	67
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	68
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian	68
3.3.1 Populasi Penelitian	68
3.3.2 Sampel Penelitian	68
3.4 Jenis dan Sumber Data	69
3.5 Teknik Pengumpulan Data	70
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	71
3.6.1 Variabel Penelitian	71
3.6.1.1 Variabel Bebas (<i>Dependent Variable</i>).....	71
3.6.1.2 Variabel Terikat (<i>Independent Variable</i>)	71
3.6.2 Definisi Operasional	72
3.6.2.1 Variabel Dependen.....	72
3.6.2.1.1 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	72
3.6.2.2 Variabel Independen	72
3.6.2.2.1 Ukuran Pemerintah Daerah	72
3.6.2.2.2 Tingkat Kekayaan Pemerintah Daerah.....	73
3.6.2.2.3 Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat	74
3.6.2.2.4 Belanja Modal.....	74
3.6.2.2.5 <i>Leverage</i>	75
3.6.2.2.6 Ukuran Legislatif	75
3.6.2.2.7 Opini Badan Pemeriksa Keuangan	76
3.7 Metode Analisis Data	76
3.7.1 Statistik Deskriptif.....	77
3.7.2 Uji Asumsi Klasik.....	77
3.7.2.1 Uji Normalitas	77
3.7.2.2 Uji Multikolineritas.....	78
3.7.2.3 Uji Heteroskedastisitas	78
3.7.3 Pengujian Hipotesis	79
3.7.3.1 Analisis Regresi Linear Berganda.....	79
3.7.3.2 Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)	80

3.7.3.3	Pengujian Parsial (Uji t)	80
3.7.3.4	Pengujian Simultan (Uji f)	81
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	84
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	84
4.2	Analisis Statistik Deskriptif	87
4.3	Uji Asumsi Klasik	92
4.3.1	Uji Normalitas	92
4.3.2	Uji Multikolinearitas	96
4.3.3	Uji Heteroskedastisitas	98
4.4	Pengujian Hipotesis	100
4.4.1	Analisis Regresi Linear Berganda	100
4.4.2	Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)	103
4.4.3	Uji <i>Parsial</i> (Uji t)	104
4.4.4	Uji <i>Simultan</i> (Uji f)	107
4.5	Pembahasan	108
4.5.1	Pengaruh Ukuran Pemerinah Daerah terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	108
4.5.2	Pengaruh Tingkat Kekayaan Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah..	109
4.5.3	Pengaruh tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	111
4.5.4	Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	112
4.5.5	Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	113
4.5.6	Pengaruh Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	114
4.5.7	Pengaruh Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	115
4.5.8	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan	116
BAB V	PENUTUP	118
5.1	Kesimpulan	118
5.2	Keterbatasan	122
5.3	Saran	123
DAFTAR PUSTAKA		124
LAMPIRAN		130

DAFTAR TABEL

Tabel	halaman
2.1 Penelitian Terdahulu	44
3.1 Pengukuran Opini Audit	76
4.1 Sampel Penelitain	84
4.2 Statistik Deskriptif.....	86
4.3 <i>Uji One Sample Kolmogrov-Smirnov Sebelum Outlier Data</i>	91
4.4 <i>Uji One Sample Kolmogrov-Smirnov Setelah Outlier Data</i>	94
4.5 Uji Multikolinearitas	95
4.6 Regresi Linear Berganda	98
4.7 Koefisien Determinasi (Uji R^2)	101
4.8 Uji <i>Parsial</i> (Uji t)	103
4.9 Uji <i>Simultan</i> (Uji f)	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar		halaman
1.1	Distribusi Status Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Indonesia Tahun 2018 Untuk LPPD Tahun 2017	4
2.1	Kerangka Pemikiran.....	51
4.1	Grafik <i>Normal Probability Plot of Regression Standardized Residual</i> Sebelum <i>Outlier Data</i>	90
4.2	<i>Outlier Data Box and Whisker Plot (Box-Plot)</i>	92
4.3	Grafik <i>Normal Probability Plot of Regression Standardized Residual</i> Setelah <i>Outlier Data</i>	93
4.4	Uji Heteroskedastisitas	97

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		halaman
1	Biodata	131
2	Daftar Kriteria Pemerintah Daerah Indonesia yang Menjadi Sampel Penelitian.....	132
3	Nilai Setiap Variabel	135
4	Hasil Statistik Deskriptif	148
5	Hasil Uji Asumsi Klasik Sebelum <i>Outlier</i> Data	149
6	Hasil Metode Data <i>Outlier</i>	152
7	Hasil Uji Asumsi Klasik Setelah <i>Outlier</i> Data	154
8	Hasil Uji Hipotesis.....	157

DAFTAR SINGKATAN

ANOVA	: <i>Analysis of Variance</i>
APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara
BM	: Belanja Modal
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPS	: Badan Pusat Statistik
DAK	: Dana Alokasi Khusus
DAU	: Dana Alokasi Umum
DBH	: Dana Bagi Hasil
DER	: <i>Debt Equity Ratio</i>
DJPK	: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
EKPPD	: Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
EPPD	: Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
IKK	: Indikator Kinerja Kunci
ILPPD	: Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Kemendagri	: Kementerian Dalam Negeri
Kepmendagri	: Keputusan Menteri Dalam Negeri
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
Lev	: <i>Leverage</i>
LKPj	: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Ln	: Logaritma Natural
LPPD	: Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
OP	: Opini
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
Pemda	: Pemerintah Daerah
Permendagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
PP	: Peraturan Pemerintah
RKPD	: Rencana Kerja Pembangunan Daerah
RLPPD	: Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SPSS	: <i>Statistical Package for the Social Sciences</i>
TA	: Total Aset
TMP	: Tidak Menyatakan Pendapat
TW	: Tidak Wajar
UNDP	: <i>United Nations Development Programme</i>
UNFPA	: <i>United Nations Population Fund Activities</i>
UNOPS	: <i>United Nations Office for Project Services</i>
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
VIF	: <i>Variance Inflation Factor</i>
WDP	: Wajar Dengan Pengecualian
WTP	: Wajar Tanpa Pengecualian
WTP-DPP	: Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak diterapkannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sejak 1 Januari 2001 pengelolaan pemerintah daerah di Indonesia mengalami perubahan secara fundamental. Hal ini mencakup perubahan hak, wewenang, dan kewajiban suatu daerah otonom. Otonomi daerah di Indonesia diberlakukan dengan disahkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah kemudian dicabut dengan diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang pada tahun 2014 undang-undang tersebut dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga diganti dengan disahkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dengan pertimbangan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah.

Pasal 1 Ayat 6, UU No. 23 Tahun 2014, mendefinisikan otonomi daerah sebagai “hak, wewenang, dan kewajiban, daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Selain melimpahkan wewenang kepada pemerintah daerah Pasal 69 Ayat 1, UU No. 23 Tahun 2014 juga mewajibkan kepala daerah untuk menyampaikan beberapa laporan kepada pemerintah pusat.

Laporan kepala daerah kepada pemerintah pusat dijelaskan lebih lanjut dalam PP No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD). Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PP No. 13 Tahun 2019.

Untuk Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) yang terakhir kali ditetapkan pada tahun 2018, yang diumumkan pada tahun 2019 untuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun anggaran 2017. Masih mengacu pada PP No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

Pasal 2, PP No. 3 Tahun 2007 menjelaskan mengenai ruang lingkup Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mencakup urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan. Untuk pedoman penyusunan LPPD untuk pemerintah daerah diatur dalam PP No 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang didalamnya menyebutkan salah satu evaluasi penyelenggaraan Pemerintah daerah adalah berupa EKPPD yang merupakan suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja.

Kemudian untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Ayat 1, PP No. 6 Tahun 2008, maka diterbitkan Permendagri No. 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 4 Permendagri No. 73 Tahun 2009 dijelaskan bahwa evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah menggunakan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai sumber informasi utama dan terdapat beberapa informasi pelengkap yang berupa laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), informasi keuangan daerah, dan laporan kinerja instansi pemerintah daerah. Adapun metode EKPPD yang digunakan ialah dengan menilai total indeks komposit kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Hasil dari EKPPD salah satunya berupa EKPPD tahunan yang meliputi pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, penentuan peringkat, dan penentuan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan provinsi, kabupaten/kota secara nasional. Untuk penetapan peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah secara nasional akan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) setelah mempertimbangkan hasil sidang tim nasional EPPD yang bertugas membantu Presiden dalam melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah secara nasional.

Berdasarkan hasil EKPPD Tahun 2018 untuk LPPD tahun anggaran 2017 dari 489 pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Terdapat 195 kabupaten/kota yang memperoleh status sangat tinggi yang menunjukkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang sangat baik, sebanyak 301 kabupaten/kota mendapatkan status tinggi yang menunjukkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan 31 kabupaten/kota berstatus sedang menunjukkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang sedang, Secara lengkap dapat dilihat pada gambar 1.1 sebagaimana dibawah ini.

Gambar 1.1
Distribusi Status Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota Indonesia Tahun 2018 Untuk LPPD Tahun 2017



Sumber: Olah Data Penulis dari Hasil EKKPD tahun 2018

Gambar diatas menunjukkan bahwa 68% pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia belum mampu menyelenggarakan pemerintahan daerah dengan predikat sangat baik yang di proksikan dengan status kinerja sangat tinggi dengan rincian 62% berstatus tinggi dan 6% berstatus sedang. Hal ini merupakan permasalahan yang penting untuk di kaji faktor penyebabnya, sehingga pemerintah daerah dapat mengambil tindakan untuk memperbaiki kinerjanya sebagaimana yang ditargetkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat.

Untuk mencari tahu faktor yang menyebabkan belum mampunya pemerintah daerah menyelenggarakan pemerintah daerah dengan sangat baik dapat ditelusuri dengan melihat laporan yang menjadi acuan dalam penyusunan dari EKPPD. Sebelumnya telah disebutkan bahwa laporan yang menjadi sumber informasi utama dalam EKPPD adalah laporan penyelenggaraan pemerintah daerah serta terdapat beberapa laporan yang berguna sebagai informasi

pelengkap, yang kemudian dari laporan-laporan tersebut di hitung dengan menilai total Indikator Kinerja Kunci (IKK) penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dalam pasal 2, PP No. 3 Tahun 2007 yang menjelaskan mengenai ruang lingkup Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota harus mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara, sedangkan urusan pilihan adalah urusan yang secara nyata ada di daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah.

Berdasarkan peraturan tersebut dapat disimpulkan isi dari LPPD kabupaten/kota akan sangat tergantung dari urusan yang menjadi tanggung jawab setiap daerah serta tergantung dari urusan pilihan yang telah dipilih sesuai karakteristik dari masing-masing pemerintah daerah. Hal ini juga disebutkan dalam penelitian Mustikarini dan Fitriyani (2012), yang menyimpulkan "isi dari LPPD Pemda kabupaten/kota sangat tergantung dengan urusan yang menjadi tanggung jawabnya dan karakteristik dari masing-masing Pemda tersebut". Karakteristik pemerintah daerah dalam beberapa penelitian terdahulu dijelaskan dengan berbagai variabel diantaranya, ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja modal, *leverage*, dan ukuran legislatif.

Ukuran pemerintah daerah dalam beberapa penelitian terdahulu sering digunakan sebagai salah satu variabel untuk menjelaskan karakteristik pemerintah daerah. Menurut Patrick (2007) ukuran organisasi mengacu pada seberapa besar sebuah organisasi yang bisa diukur dengan jumlah karyawan (*a measure of human capital*), total aset (*a measure of fiscal resources*), tingkat

kapasitas (*a measure of capacity*), dan tingkat produksi (*a measure of volume*), sehingga dapat disimpulkan ukuran pemerintah daerah merupakan sebuah ukuran yang digunakan untuk mengukur seberapa besar sebuah pemerintah daerah. Ukuran pemerintah daerah penting digunakan dalam menjelaskan karakteristik pemerintah daerah karena sebagaimana diketahui setiap pemerintah daerah memiliki ukuran yang berbeda antara satu dan yang lainnya.

Dalam beberapa penelitian terdahulu, tingkat kekayaan pemerintah daerah juga salah satu variabel yang sering digunakan untuk menjelaskan karakteristik pemerintah daerah. Menurut Aminah (2019) tingkat kekayaan pemerintah daerah atau *wealth* merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhannya. Tingkat kekayaan pemerintah daerah dapat ditunjukkan dengan perbandingan total PAD terhadap total pendapat dari suatu daerah (Mustikarini, 2012). Selain ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan pemerintah daerah juga penting digunakan dalam menjelaskan karakteristik pemerintah daerah. Hal ini karena kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahannya berbeda-beda setiap pemerintah daerah.

Selain ukuran dan tingkat kekayaan pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pemerintah daerah juga merupakan salah satu variabel yang digunakan untuk menjelaskan karakteristik dari suatu pemerintah daerah. Menurut Patrick (2007) tingkat kekayaan pemerintah daerah (*intergovernmental revenue*) salah satu pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membiayai operasi pemerintah daerah. Di Indonesia pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam rangka pemerataan kemampuan keuangan antar daerah diberikan dalam bentuk DAU. Jumlah DAU suatu daerah tentunya berbeda-beda tergantung dari besar kecilnya celah fiskal

(*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*).

Selain tiga karakteristik sebelumnya yang terkait dengan kekayaan dan pendapatan pemerintah daerah maka variabel keempat terkait belanja pemerintah daerah. Dalam beberapa penelitian terdahulu variabel belanja modal juga sering digunakan dalam menjelaskan karakteristik dari satu pemerintah daerah. Menurut PP No. 12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mendefinisikan belanja modal sebagai pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 periode akuntansi.

Untuk variabel kelima yang digunakan dalam menjelaskan karakteristik pemerintah daerah adalah *leverage*. Menurut Hanafi dan Halim (2012:75) menjelaskan rasio *leverage* sebagai rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan (entitas) dalam memenuhi kewajiban – kewajiban jangka panjangnya. Kusumawardani (2012) mendefinisikan *leverage* sebagai perbandingan antara utang dan modal, perbandingan antara utang dan modal ini biasa disebut sebagai *Debt to Equity Ratio* (DER). Rasio *leverage* ini dalam beberapa penelitian terdahulu telah digunakan dalam menjelaskan karakteristik pemerintah daerah, karena seperti diketahui pemerintah daerah diperbolehkan untuk melakukan pinjaman (hutang) untuk menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Variabel terakhir dan variabel yang keenam yang digunakan dalam menjelaskan karakteristik pemerintah adalah ukuran legislatif. Dalam konsep *Trias Politica* kekuasaan negara terdiri dari 3 (tiga) macam kekuasaan, yaitu

legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Secara singkat legislatif adalah kekuasaan yang diberikan tugas dan wewenang untuk membuat undang-undang. Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia yang merupakan buah dari otonomi daerah, kekuasaan legislatif atau lembaga legislatif di daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Selain membuat undang-undang DPRD juga mempunyai tugas dan wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang atau peraturan yang telah dibuat. Ukuran legislatif dalam penelitian ini diukur dengan jumlah anggota dewan setiap pemerintah daerah, hal ini juga sesuai dengan penelitian Sumarjo (2010) yang menggunakan jumlah anggota DPRD dalam mengukur ukuran legislatif. Jumlah anggota DPRD dalam menjelaskan ukuran legislatif dipilih karena jumlah anggota DPRD setiap pemerintah daerah berbeda antara satu dan yang lainnya, sesuai dengan peraturan dan undang – undang yang berlaku.

Untuk penelitian terdahulu yang menggunakan karakteristik pemerintah daerah dalam penelitannya antara lain, Penelitian yang dilakukan Mustikarini dan Fitriyani (2012) yang mengaitkannya dengan kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia menggunakan variabel ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dan belanja daerah dalam menjelaskan karakteristik pemerintah daerah. Marfiana dan Kurniasih (2013) meneliti tentang karakteristik pemerintah daerah dengan keterkaitannya terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Pulau Jawa dengan menggunakan ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja daerah, dan ukuran legislatif. Penelitian yang dilakukan Sumarjo (2010) menggunakan ukuran (*size*), kemakmuran (*wealth*), ukuran legislatif, *leverage*, dan *intergovernmental revenue* dalam menjelaskan karakteristik pemerintah daerah. Penelitian

Sudarsana dan Rahardjo (2013) menggunakan ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan dengan pusat, dan belanja modal dalam memproksikan karakteristik pemerintah daerah.

Selain karakteristik pemerintah daerah, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga bisa digunakan dalam mengukur kinerja pemerintah daerah. Hal ini karena dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, masalah keuangan merupakan salah satu unsur yang tidak bisa dipisahkan dalam penyusunan LPPD suatu pemerintah daerah, sehingga diperlukan pemeriksaan dan pengawasan agar tidak terjadi kecurangan dalam proses pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. UU No. 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengartikan pemeriksaan sebagai “proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara”.

Untuk tugas pemeriksaan keuangan negara dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemeriksaan Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPK terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksa dengan tujuan tertentu. Adapun hasil dari pemeriksaan yang dilakukan BPK terdiri atas opini, temuan, kesimpulan, atau berupa rekomendasi.

Penelitian yang dilakukan Mustikarini dan Fitriyasi (2012), Sumarjo (2010), serta Sudarsana dan Rahardjo (2013) menggunakan temuan audit BPK yang mengaitkannya dengan kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Marfiana dan Kurniasih (2013) menggunakan hasil pemeriksaan BPK yang

diprosikan dengan temuan audit dan opini audit dengan keterkaitannya terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Pulau Jawa.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Mustikarini dan Fitriyani (2012) dengan perbedaan dalam tiga hal. Perbedaan pertama, variabel belanja daerah diukur dengan menggunakan belanja modal. Perbedaan kedua, peneliti menambahkan *leverage* untuk mengukur utang pemerintah daerah dan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengukur ukuran legislatif dalam menjelaskan karakteristik pemerintah daerah. Perbedaan ketiga, dalam menjelaskan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan menggunakan opini audit yang dikeluarkan BPK untuk pemerintah daerah.

Berdasarkan pertimbangan uraian diatas peneliti ingin menguji apakah karakteristik pemerintah daerah dan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan memiliki pengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang diukur dengan nilai EKPPD yang sumber informasi utamanya dari LPPD, penelitian ini juga bermaksud melanjutkan sekaligus memperluas cakupan penelitian-penelitian sebelumnya, dan menggunakan hasil EKKPD tahun 2018 untuk LPPD Tahun Anggaran 2017, dengan harapan mampu memberikan informasi yang relevan saat ini. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka beberapa masalah yang dapat dirumuskan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia?
2. Apakah tingkat kekayaan daerah berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia?
3. Apakah tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia?
4. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia?
5. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia?
6. Apakah ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia?
7. Apakah opini Badan Pemeriksa Keuangan berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia?
8. Apakah karakteristik pemerintah daerah dan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan berpengaruh secara simultan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kekayaan pemerintah daerah terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh belanja modal terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia.
5. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia.
6. Untuk mengetahui pengaruh ukuran legislatif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia.
7. Untuk mengetahui pengaruh opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia.
8. Untuk mengetahui pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Pada bagian kegunaan penelitian menunjukkan kegunaan dan pentingnya penelitian, terutama bagi pengembangan ilmu atau pelaksanaan pembangunan dalam arti luas.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan bidang ilmu akuntansi khususnya sektor publik dalam membahas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan dapat memberikan tambahan wawasan kepada pembaca terkait variabel-variabel yang mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah secara empiris yang didukung oleh berbagai teori yang melandasi penelitian ini.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan wawasan mengenai penetapan peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah terhadap laporan penyelenggaraan pemerintah daerah.

2. Bagi Peneliti Lainnya

Sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini.

3. Bagi Pihak Manajer Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyediaan data capaian kinerja pada tataran pengambil kebijakan daerah dan tataran pelaksana kebijakan

daerah yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) dan laporan lainnya.

4. Bagi Penulis

Sebagai bahan pembelajaran bagi penulis untuk lebih menambah wawasan keilmuan khususnya yang berkaitan dengan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika penulisan yang berurutan, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh terhadap penelitian ini. Penelitian ini terdiri dari beberapa bab, yaitu sebagai berikut.

BAB I : Pendahuluan

Pendahuluan merupakan bab pertama dalam skripsi yang memberikan jawaban atas pertanyaan terkait apa yang diteliti? Untuk apa dan mengapa penelitian dilakukan. Bab ini terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi deskripsi teoritis tentang variabel yang dilibatkan dalam penelitian, hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, hipotesis hingga argumentasi peneliti untuk mengintegrasikan teori yang dijadikan sebagai landasan teori dalam penelitian dengan hasil yang diperoleh secara relevan.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini memberikan penjelasan terkait rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional variabel serta metode analisis data.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan gambaran umum organisasi, hasil uji kualitas data, hasil uji asumsi klasik, hasil pengujian hipotesis, serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V : Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir dalam skripsi yang berisi kesimpulan atas penelitian, keterbatasan penelitian hingga saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Landasan teori merupakan teori-teori yang relevan dan dapat digunakan untuk menjelaskan variabel-variabel penelitian yang dapat berfungsi sebagai dasar untuk memberi jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan, serta membantu dalam penyusunan instrumen penelitian

2.1.1 Teori Agensi

Pada dasarnya organisasi sektor publik terbentuk berdasarkan teori agensi, yang diakui atau tidak di pemerintahan daerah terdapat hubungan dan masalah keagenan. Dalam teori agensi terdapat hubungan keagenan yang berupa dua pihak yang melakukan kesepakatan atau kontrak, yakni pihak yang memberikan kewenangan atau kekuasaan yang selanjutnya disebut *principal* dan pihak yang menerima kewenangan atau kekuasaan yang kemudian disebut sebagai *agent* (Halim dan Abdullah 2006:53).

Teori agensi berawal dan merupakan cabang dari teori permainan (*theory of games*). Neumann dan Morgenstern (1953:2) dalam bukunya mengenai teori permainan dan perilaku ekonomi (*theory of games and economic behavior*) menjelaskan bahwa teori permainan merupakan sebuah instrumen yang tepat untuk mengembangkan dan menjelaskan teori perilaku ekonomi, dan menggunakan pendekatan matematis untuk menjelaskan situasi persaingan dan konflik kepentingan antara berbagai pihak yang bertindak secara rasional. Teori permainan dikembangkan untuk memprediksi dan menemukan bentuk pemecahan konflik kepentingan antara individu yang rasional, dan mencoba

untuk memahami bagaimana manajer, investor dan pihak-pihak yang berkaitan dapat secara rasional bersepakat dengan konsekuensi ekonomi dari pelaporan keuangan yang pada akhirnya akan digunakan dalam proses pengambilan keputusan.

Lebih lanjut, Jensen dan Meckling (1976:308) menjelaskan teori agensi sebagai sebuah hubungan keagenan (*agent*) antara pihak pemilik (*principals*) dengan manajemen (*agent*) yang terikat dalam sebuah kesepakatan atau kontrak dimana satu orang atau lebih orang (*principals*) melibatkan orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa pekerjaan atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Jika kedua pihak dalam hubungan tersebut memaksimalkan keuntungan (*utility maximizers*) maka ada alasan yang kuat untuk meyakini bahwa agen tidak akan selalu bertindak demi kepentingan terbaik pihak prinsipal yang pada akhirnya akan cenderung menimbulkan konflik keagenan diantara pihak principal dan agent.

Konflik kepentingan yang melibatkan principal dan agen ini kemudian memunculkan masalah keagenan (*agent*). Menurut Eisendhardt (1989:58-62), teori keagenan dilandasi oleh 3 (tiga) buah asumsi yaitu: (a) asumsi tentang sifat manusia, (b) asumsi tentang informasi, dan (c) asumsi tentang keorganisasian. Asumsi tentang manusia menyatakan bahwa manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri (*self interest*), memiliki keterbatasan daya pikir mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan tidak menyukai dan lebih memilih menghindari resiko (*risk aversion*). Asumsi tentang informasi menekankan bahwa informasi dijadikan sebuah komoditi. Asumsi tentang keorganisasian menjelaskan adanya konflik antar kedua pihak (*principals and agent*), efisiensi digunakan sebagai kriteria acuan, dan terjadinya *Asymmetric Information* antara prinsipal dan agen.

Dalam konsep ketatanegaraan, hubungan antara agen dan principal dapat dipetakan dengan pemerintah daerah diposisikan sebagai agen bagi masyarakat yang telah memilihnya yang dalam hal ini merupakan pihak principal. Sebagaimana dijelaskan oleh Lupia & McCubbins (2000:291) *citizens are principals who elect representatives to serve as their agents in parliament*, dan Andvig et al. (2001:89) *the voters are the principal of the parliament*. Maka dengan kemungkinan timbulnya konflik keagenan, dan mengingat asumsi yang melandasi teori keagenan (Eisendhardt, 1989) maka pihak principal dalam hal ini masyarakat secara logis dan penuh kesadaran akan beranggapan bahwa pemerintah daerah yang merupakan agent tidak dapat dipercaya akan bertindak sepenuhnya demi kepentingan terbaik bagi masyarakat (*principals*). Hal ini dapat terjadi ketika kedua belah pihak memaksimalkan keuntungan (*utility maximizers*) sesuai dengan asumsi yang melandasi teori keagenan yang diungkapkan oleh Eisendhardt.

Dalam prosesnya, untuk mengatasi serta mencegah konflik dan masalah yang bisa timbul dari hubungan keagenan, maka pengelolaan pemerintah daerah di Indonesia harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berjalan dengan sebagaimana mestinya sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Menurut UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mendefinisikan proses pemeriksaan sebagai “proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara”. Salah satu wujud pengawasan yang dilakukan di Indonesia ialah dengan membentuk satu badan unit independen

untuk mengaudit seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Pengawasan tersebut dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Adapun hasil dari pemeriksaan yang dilakukan BPK tersebut berupa opini, temuan, kesimpulan atau dalam bentuk rekomendasi. Dengan dilakukannya pengawasan tersebut diharapkan kualitas dari pelaporan pemerintah daerah baik secara finansial maupun nonfinansial dapat meningkat, dan diharapkan informasi yang akan diterima masyarakat selaku prinsipal menjadi lebih berimbang sehingga *Asymmetric Information* yang terjadi dapat berkurang.

Menurut Arifah (2012:87) *Asymmetric Information* merupakan kondisi dimana informasi tidak seimbang yang disebabkan karena distribusi informasi yang tidak sama antara principal dan agen. Prinsipal seharusnya menerima informasi yang dibutuhkan dalam rangka mengukur tingkat hasil yang diperoleh dari usaha agen, namun kenyataannya informasi tentang ukuran keberhasilan yang diperoleh prinsipal tidak seluruhnya disajikan oleh agen. Akibatnya informasi yang diterima prinsipal kurang lengkap sehingga tidak dapat menjelaskan kinerja agen yang sesungguhnya dalam mengelola kekayaan prinsipal yang sebelumnya telah dipercayakan kepada agen. Dalam banyak literatur formal, akibat terjadinya asimetri informasi dapat berujung pada 2 permasalahan agensi (*agency problems*), yang disebabkan adanya kesulitan prinsipal untuk memonitor dan melakukan kontrol terhadap tindakan yang dilakukan agen. Adapun permasalahan yang dimaksud berupa *moral hazard* dan *adverse selection*. *Moral hazard* ialah permasalahan yang terjadi ketika agen tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak, dan *adverse selection* merupakan suatu keadaan dimana prinsipal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan

yang diambil oleh agen benar-benar didasarkan atas informasi yang diperolehnya, atau terjadi sebuah kelalaian dalamnya (*misrepresentation*).

Dengan adanya permasalahan agensi (*agency problem*) maka akan memunculkan biaya keagenan (*agency cost*), Menurut (Jensen & Meckling, 1976:308) biaya keagenan yang dapat terjadi berupa :

1. *The Monitoring Expenditures by the Principle.*

Biaya yang timbul dan ditanggung oleh prinsipal untuk memonitor perilaku agen, termasuk juga usaha untuk mengendalikan (*control*) perilaku agen melalui *budget restriction*, dan *compensation policies*.

2. *The Bonding Expenditures by the Agent.*

Biaya yang ditanggung oleh agen untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa agen akan bertindak untuk kepentingan prinsipal.

3. *Residual Loss.*

Merupakan penurunan tingkat kesejahteraan prinsipal maupun agen setelah adanya hubungan keagenan (*agency relationship*).

2.1.2 Akuntabilitas dan Transparansi

United Nations Development Programme (UNDP), United Nations Population Fund Activities (UNFPA), dan United Nations Office for Project Services (UNOPS) telah menyetujui satu definisi dari akuntabilitas (*accountability*). Akuntabilitas didefinisikan sebagai kewajiban untuk menunjukkan pekerjaan yang telah dilakukan sesuai dengan aturan dan standar, melaporkan secara jujur dan akurat tentang hasil kinerja peran atau rencana yang telah diamanatkan.

Dalam konteks organisasi pemerintah, tidak terlepas dari istilah akuntabilitas publik. Menurut Mardiasmo (2002:20) akuntabilitas publik merupakan sebuah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan

pertanggungjawaban, menyajikan dan melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Masih dalam Mardiasmo (2002:21) menjelaskan bahwa terdapat dua macam akuntabilitas publik, yaitu (1) akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*), dan (2) akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*). Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) merupakan pertanggung jawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggung jawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Dalam tata kelola pemerintahan, selain prinsip akuntabilitas sering juga di suarakan tentang penerapan prinsip transparansi atau prinsip keterbukaan. Kedua prinsip tersebut merupakan beberapa prinsip yang harus dimiliki pemerintahan demi mewujudkan “*Good Governance*” atau biasa disebut tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, mendefenisikan asas umum pemerintahan yang baik sebagai asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatuhan dan norma hukum, untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam UU tersebut terdapat 7 asas umum penyelenggaraan negara dan dua diantaranya merupakan asas akuntabilitas dan transparansi atau keterbukaan. Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan

Penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang dimaksud asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

Untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi itu, maka dikeluarkan PP No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. Pada Pasal 9, PP No. 3 Tahun 2007 juga menegaskan bahwa penyusunan LPPD menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas. Penelitian terkait tata kelola pemerintah yang baik yang dikaitkan dengan kualitas laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah telah dilakukan oleh Haliah, Natsir, dan Muallimin (2017) yang meneliti tentang personal faktor, sistem/administratif faktor dan politik faktor terhadap kualitas laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah (kajian dalam rangka pengembangan model tata kelola pemerintahan yang baik).

2.1.3 Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Pasal 69 ayat 1, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah pusat mewajibkan setiap kepala daerah untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta menyampaikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(RLPPD) kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Kemudian karena pertimbangan Pasal 74, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka disahkan lah PP No. 13 tahun 2019.

Namun dalam evaluasi yang terakhir kali dilakukan oleh pemerintah pusat, masih mengacu pada PP No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

Dalam PP No. 3 tahun 2007, yang dimaksud LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada pemerintah pusat. Adapun ruang lingkup dari LPPD mencakup urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan. Urusan desentralisasi meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara. Sedangkan urusan pilihan merupakan urusan yang secara nyata ada di daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.

Lebih lanjut LPPD akan digunakan pemerintah sebagai acuan untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan sebagai bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun salah satu evaluasi kinerja yang dilakukan Pemerintah terhadap Pemerintah daerah berupa EKPPD

yang dalam prosesnya menggunakan LPPD sebagai sumber informasi utamanya.

2.1.4 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)

Menurut PP Nomor 6 Tahun 2008, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat EKPPD merupakan suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja. Sistem pengukuran kinerja yang dimaksud adalah sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Adapun dasar pelaksanaan EKPPD tertuang dalam Permendagri No. 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang dimana Permendagri ini dikeluarkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (1), Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008, yang dalam prosesnya Peraturan Pemerintah tersebut melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang sekarang telah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dalam pasal 5 Permendagri No. 73 Tahun 2009, dijelaskan mengenai sumber informasi EKPPD yang terdiri dari :

1. EKPPD menggunakan LPPD sebagai informasi utama.
2. Selain menggunakan LPPD dapat digunakan sumber informasi pelengkap yang berupa:
 - a. Laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.
 - b. Informasi keuangan daerah.
 - c. Laporan kinerja instansi pemerintah daerah.

- d. Laporan hasil pembinaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintah daerah.
- e. Laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah daerah.
- f. Laporan Kepala Daerah atas permintaan khusus.
- g. Rekomendasi/tanggapan DPRD terhadap LKPj kepala daerah.
- h. Laporan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berasal dari lembaga independen.
- i. Tanggapan masyarakat atas Informasi LPPD.
- j. Laporan dan/atau informasi lain yang akurat dan jelas penanggungjawabnya.

Kemudian sumber informasi yang telah disebutkan sebelumnya akan difokuskan pada informasi capaian kinerja pada tataran pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan menggunakan IKK. Menurut Mardiasmo (2002:125) indikator kinerja kunci merupakan sekumpulan indikator yang dapat dianggap sebagai ukuran kinerja kunci baik yang bersifat finansial maupun nonfinansial untuk melaksanakan operasi dan kinerja unit bisnis, yang dimana indikator ini dapat digunakan oleh manajer untuk mendeteksi dan memonitor capaian kinerja. Dan menurut Permendagri No. 73 Tahun 2009, indikator kinerja kunci adalah indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

EKPPD menggunakan metode yang menilai total Indeks Komposit Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi dua indeks penilaian. Yang pertama indeks capaian kinerja yang terdiri dari menilai IKK pada aspek tataran pengambil kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, dan yang kedua indeks kesesuaian materi. Adapun IKK yang dimaksud merupakan satu kesatuan dalam

sistem pengukuran kinerja mulai dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pemerintah daerah, antar satu daerah, dengan daerah lainnya dalam tingkat wilayah provinsi maupun pada tingkat nasional. IKK berisikan data capaian kinerja yang diisi oleh masing-masing SKPD sesuai dengan tugas fungsinya dan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Tim Penilai.

Aspek tataran pengambilan kebijakan pada pengukuran indeks capain kinerja dengan menilai IKK meliputi :

1. Ketentraman dan ketertiban umum daerah.
2. Keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan Pemerintah serta antar pemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah.
3. Keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan Pemerintah.
4. Efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD.
5. Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan.
6. Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh kepala daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan.
7. Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan.
8. Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintah daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk daerah.
9. Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

10. Intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah.
11. Efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggung jawaban, dan pengawasan APBD.
12. Pengelolaan potensi daerah.
13. Terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Aspek tataran pelaksanaan kebijakan daerah pada pengukuran indeks capaian kinerja dengan menilai IKK meliputi:

1. Kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan.
2. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
3. Tingkat capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
4. Penataan kelembagaan daerah
5. Pengelolaan kepegawaian daerah
6. Perencanaan pembangunan daerah
7. Pengelolaan keuangan daerah
8. Pengelolaan barang milik daerah
9. Pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat.

Dalam pelaksanaannya EKPPD akan dilaksanakan oleh Tim Nasional EPPD dan hasil EKPPD tersebut terdiri dari atas, EKPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah dan EKPPD Tahunan. EKPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah merupakan rekapitulasi atas prestasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun atau kurang dari 5 (lima) tahun yang akan digunakan Kepala Daerah yang terpilih sebagai masukan dan mempertimbangkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. EKPPD tahunan digunakan pemerintah sebagai dasar untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan

otonomi atau pembentukan, penghapusan/penggabungan daerah otonom. Hasil EKPPD tersebut berupa laporan penetapan peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah secara nasional yang dikeluarkan melalui keputusan menteri dalam negeri setelah mempertimbangkan hasil sidang tim nasional EPPD, dan diumumkan pada Peringatan Hari Otonomi Daerah pada tanggal 25 April setiap tahunnya.

2.1.5 Karakteristik Pemerintah Daerah

Daft (2009:14) dalam bukunya yang berjudul *Organization Theory and Design* menyatakan bahwa langkah pertama untuk memahami organisasi adalah dengan melihat dimensi yang menggambarkan ciri-ciri (karakteristik) dari suatu organisasi tertentu. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa organisasi dalam hal ini pemerintah daerah dapat dipahami melalui ciri-ciri/karakteristiknya yang antara satu dan lainnya memiliki ciri-ciri/karakteristik masing-masing.

Penelitian yang dilakukan Suhardjanto dan Yulianingtyas (2011) pada sektor pemerintahan mendefinisikan karakteristik pemerintah daerah sebagai ciri-ciri khusus yang melekat pada pemerintah daerah, menandai sebuah daerah, dan membedakannya dengan daerah lain. Sumarjo (2010) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa terdapat pengaruh karakteristik perusahaan terhadap kinerja suatu perusahaan dan hal tersebut dapat diterapkan pada sektor pemerintahan, dimana karakteristik suatu daerah, dapat menjadi prediktor yang baik untuk mengukur kinerja suatu pemerintah daerah.

Patrick (2007) menggunakan model Roger dalam mengidentifikasi karakteristik pemerintah daerah Pennsylvania dengan menggunakan tiga komponen organisasi yaitu, budaya organisasi (*organizations culture*), struktur organisasi (*organizational structure*), dan lingkungan eksternal (*external environment*). Sumarjo (2010) menjelaskan karakteristik pemerintah daerah

dengan menggunakan ukuran (*size*) yang dihitung melalui jumlah total aset, kemakmuran (*wealth*) dengan jumlah pendapatan asli daerah , ukuran legislatif dengan jumlah total anggota DPRD, *leverage* dengan *debt to equity* dan intergovernmental revenue dihitung dengan perbandingan antara jumlah total dana perimbangan (DAU) dengan jumlah total pendapatan. Penelitian terkait karakteristik pemerintah daerah yang dilakukan Marfiana dan Kurniasih (2013) menggunakan ukuran pemerintah daerah yang dihitung berdasarkan total aset pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah yang dihitung berdasarkan perbandingan antara total pendapatan asli daerah dengan total pendapatan daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat yang dihitung berdasarkan perbandingan antara total dana alokasi umum dengan total pendapatan daerah, belanja daerah yang dihitung berdasarkan total realisasi belanja daerah, ukuran legislatif yang dihitung berdasarkan jumlah dari anggota DPRD. Sudarsana dan Rahardjo (2013) menggunakan ukuran daerah yang diukur melalui jumlah total aset, tingkat kekayaan daerah yang diukur melalui perbandingan total pendapatan asli daerah dengan total pendapatan daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat yang diukur melalui perbandingan total dana alokasi umum dengan total pendapatan daerah, belanja modal diukur melalui dengan perbandingan jumlah belanja modal dengan total belanja daerah. Kemudian, Mustikarini dan Fitriasisari (2012) menggunakan ukuran pemerintah daerah yang diprosikan dengan total aset pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah yang diprosikan dengan pendapatan asli daerah, tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat yang diprosikan dengan dana alokasi umum, dan belanja daerah untuk menjelaskan karakteristik pemerintah daerah.

Berdasarkan pertimbangan penelitian terdahulu, maka penelitian ini dalam menjelaskan karakteristik pemerintah daerah menggunakan ukuran pemerintah daerah yang diukur dengan jumlah total aset, tingkat kekayaan daerah yang diukur dengan perbandingan antara pendapatan asli daerah dengan total pendapatan daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat yang diukur dengan perbandingan dana alokasi umum dengan total pendapatan daerah, total belanja modal, *leverage* yang diukur dengan *debt to equity*, dan ukuran legislatif diukur dengan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota.

2.1.5.1 Ukuran Pemerintah Daerah

Menurut (Patrick 2007) ukuran organisasi mengacu pada seberapa besar organisasi itu. Ukuran sebuah organisasi dapat diukur dengan berbagai cara, termasuk jumlah karyawan (*a measure of human capital*), total aset (*a measure of fiscal resources*), tingkat kapasitas (*a measure of capacity*), dan tingkat produksi (*a measure of volume*). Penelitian yang dilakukan Sudarmadji dan Sularto (2007) menjelaskan bahwa ukuran dari sebuah perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar. Ketiga variabel ini digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan karena dapat mewakili seberapa besar perusahaan tersebut. Semakin besar aktiva maka semakin banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang, semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ia dikenal dalam masyarakat. Kemudian dari ketiga variabel tersebut nilai aktiva dianggap lebih stabil dalam menggambarkan ukuran sebuah perusahaan.

Dalam beberapa penelitian terdahulu, (Sumarjo, 2010; Mustikarini & Fitriyani, 2012; Marfiana & Kurniasih, 2013; Sudarsana & Rahardjo, 2013) karakteristik pemerintah daerah diukur dengan menggunakan total aset. Menurut

Mustikarini dan Fitriasaki (2012) penggunaan total aset untuk menjelaskan ukuran pemerintah daerah karena tujuan utama pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, yang dalam prosesnya memberikan pelayanan terbaik harus didukung oleh aset yang baik pula. Oleh karena itu, sumber daya dan fasilitas yang memadai diperlukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, semakin besar ukuran daerah yang ditandai dengan besarnya jumlah aset pemerintah daerah, maka diharapkan akan semakin tinggi kinerja pemerintah daerah tersebut.

2.1.5.2 Tingkat Kekayaan Pemerintah Daerah

Tingkat kekayaan pemerintah daerah dapat digambarkan dari jumlah pendapatan asli daerah yang dimiliki suatu daerah (Sumarjo, 2010; Mustikarini & Fitriasaki, 2012; Marfiana & Kurniasih, 2013; Sudarsana & Rahardjo, 2013). UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mendefinisikan PAD sebagai pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bastian dan Soepriyanto (2003:83) menjelaskan dan mengklasifikasikan PAD sebagai semua pendapatan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang diklasifikasikan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:

1. Pajak Daerah: Pajak Kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak kendaraan diatas air, pajak air dibawah tanah, pajak air permukaan.
2. Retribusi Daerah: Retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan atau pertokoan, retribusi pejualan produksi usaha daerah, retribusi izin trayek kendaraan penumpang, retribusi

air, retribusi jembatan timbang, retribusi kelebihan muatan, retribusi perizinan pelayanan, dan pengendalian.

3. Bagian laba perusahaan daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan: Bagian laba Bank Pembangunan Daerah, bagian laba perusahaan daerah, dan hasil investasi pada pihak ketiga.
4. Lain-lain PAD yaitu semua PAD yang bukan berasal dari pajak, retribusi dan laba usaha daerah, antara lain: Hasil penjualan barang milik daerah, penerimaan jasa giro, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, penerimaan bunga deposito.

Penelitian yang dilakukan Noviyanti dan Kiswanto (2016) mengungkapkan bahwa tingkat kekayaan daerah yang dicerminkan dengan peningkatan PAD yang merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi. Jumlah kenaikan kontribusi PAD akan sangat berperan dalam kemandirian pemerintah daerah yang dapat dikatakan sebagai kinerja pemerintah daerah.

2.1.5.3 Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat

Dalam beberapa penelitian terdahulu mengenai karakteristik pemerintah daerah Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat (*intergovernmental revenue*) sering diproyeksikan dari jumlah DAU yang diterima suatu daerah. DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. DAU suatu daerah ditentukan oleh besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Alokasi DAU bagi daerah dengan potensi fiskal yang besar

tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang mempunyai potensi fiskal yang kecil, namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal. (UU No. 33 Tahun 2004).

Patrick (2007) menjelaskan *intergovernmental revenue* sebagai salah satu pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membiayai operasi pemerintah daerah. Sebagai timbal baliknya, pemerintah daerah membelanjakan pendapatan transfer antar pemerintah sesuai dengan alokasi, petunjuk anggaran dan sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku. Pemerintah pusat berharap dengan adanya transfer tersebut maka pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerjanya.

2.1.5.4 Belanja Modal

Penggunaan belanja modal dalam menjelaskan karakteristik pemerintah daerah dalam penelitian ini mengacu pada saran dalam penelitian Mustikarini dan Fitriyani (2012) yang menyatakan penggunaan belanja modal lebih baik digunakan dalam menjelaskan karakteristik pemerintah daerah, hal ini karena belanja modal biasanya terkait erat dengan penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu penelitian juga mempertimbangkan penelitian Nugroho (2012) yang menyatakan Pemerintah akan melakukan pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana yang diperlukan oleh negara, yang tercermin di dalam belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah. Belanja modal yang besar merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah,

sesuai dengan logika, semakin banyak sumber yang menghasilkan, maka hasilnya pun akan semakin banyak.

Menurut PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mendefinisikan belanja modal sebagai pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Adapun belanja modal dipergunakan untuk antara lain:

1. Belanja Tanah

Belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

2. Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Bangunan dan Gedung

Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

5. Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada nomor 1 sampai dengan nomor 4, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

6. Belanja Aset Lainnya

Belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

2.1.5.5 *Leverage*

Hanafi dan Halim (2012:75) menjelaskan rasio *leverage* sebagai rasio yang mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Kusumawardani (2012) mendefinisikan *leverage* sebagai perbandingan antara utang dan modal. Semakin besar *leverage* maka semakin besar ketergantungan entitas pada pihak luar karena semakin besar utang yang dimiliki entitas tersebut maka semakin rendah kinerja keuangan entitas tersebut. Perbandingan antara utang dan modal ini biasa disebut sebagai *Debt to Equity Ratio* (DER).

Menurut Ramdhani (2013) menjelaskan *debt to equity ratio* sebagai rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan

jaminan utang/pinjaman. Semakin besar DER menunjukkan makin besarnya resiko yang ditanggung atas kegagalan pembayaran utang/pinjaman.

Dalam konteks pemerintahan, pemerintah daerah dibolehkan melakukan pinjaman (hutang) sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku. Menurut UU No. 33 Tahun 2004 menjelaskan Pinjaman Daerah sebagai semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Pinjaman Daerah bertujuan memperoleh sumber pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah. Pinjaman Daerah bersumber dari:

1. Pemerintah.
2. Pemerintah daerah lain.
3. Lembaga keuangan bank.
4. Lembaga keuangan bukan bank.
5. Masyarakat.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin tingginya tingkat *leverage* dalam hal ini DER menunjukkan kinerja pemerintah daerah tersebut memiliki kinerja yang buruk. Hal ini karena pemerintah daerah yang bersangkutan tidak mampu memenuhi pembiayaannya dalam rangka penyelenggaraan pemerintah sehingga membutuhkan dana dari pihak ketiga (eksternal).

2.1.5.6 Ukuran Legislatif

Menurut Budiardjo (2005:152) ditinjau dari segi pembagian kekuasaan, lembaga negara atau lembaga pemerintah dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) bagian yaitu :

1. Secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatannya.

Maksudnya adalah pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat

pemerintah misalnya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam negara kesatuan.

2. Secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya. Maksudnya pembagian ini lebih menitik beratkan pada perbedaan antara fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Busroh (2010:85) Pembagian atau pemisahan kekuasaan sering dikenal dengan istilah "*Trias Politica*". *Trias Politica* berasal dari bahasa Yunani "Tri" yang berarti tiga "As" berarti poros/pusat, dan "*Politica*" yang berarti kekuasaan. *Trias Politica* merupakan suatu ajaran yang mempunyai anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari 3 (tiga) macam kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Legislatif adalah kekuasaan membuat undang-undang, eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang, yudikatif adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang.

Di Indonesia lembaga legislatif yang memiliki wewenang untuk membuat undang-undang tertuang didalam UU No. 17 Tahun 2014, dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa terdapat 4 (empat) lembaga yang memiliki tugas dan fungsi legislasi, yaitu, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah lembaga legislatif dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Adapun fungsi, wewenang dan tugas DPRD, yaitu:

DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi:

1. Legislasi
2. Anggaran
3. Pengawasan

DPRD kabupaten/kota mempunyai wewenang dan tugas:

1. Membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota.
2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian.
5. Memilih wakil bupati/wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati/wakil walikota.
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
10. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.6 Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sehubungan dengan itu, kepada BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 jenis pemeriksaan, yakni:

1. Pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
2. Pemeriksaan kinerja, adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Pasal 23 E, UUD 1945 mengamanatkan BPK untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan. Adapun untuk pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien, serta memenuhi sasarannya secara efektif.
3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan

atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan menurut UU No. 15 Tahun 2004 terdiri atas:

1. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
2. Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi.
3. Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan.

Adapun laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK akan disampaikan kepada:

1. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat.
2. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.
3. Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada nomor (1) dan (2) disampaikan pula kepada presiden/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
4. Laporan hasil pemeriksaan kinerja disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)/Dewan Perwakilan Daerah (DPD)/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan kewenangannya.
5. Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya.

6. Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada nomor (4) dan (5) disampaikan pula kepada Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Adapun dalam penelitian ini, Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diukur menggunakan tingkat Opini yang dikeluarkan BPK untuk pemerintah daerah kabupaten/kota.

2.1.6.1 Opini Badan Pemeriksa Keuangan

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria :

1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan.
2. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*).
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Efektivitas sistem pengendalian intern.

Adapun opini yang diberikan BPK terdiri atas 5 (lima) jenis opini, yakni :

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*).

Opini ini diberikan jika auditor dapat memperoleh semua bukti audit yang diperlukan, dan laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji yang material dan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

2. Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (*Modified Unqualified Opinion*)

Opini ini diberikan karena dalam keadaan tertentu auditor harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun hal tersebut tidak mempengaruhi opini wajar tanpa pengecualian atas laporannya. Beberapa keadaan yang menyebabkan ditambahkannya paragraf penjelasan

bisa berupa, tidak ada konsistensi dalam penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum, ketidakpastian atas kelangsungan hidup organisasi (*going concern*), dan terdapat penekanan pada suatu masalah.

3. Opini Wajar dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*).

Opini ini diberikan jika auditor telah memperoleh bukti yang cukup memadai sebagai dasar opini dan meyakini sebagian besar informasi yang diberikan dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian, namun hal tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

4. Opini tidak wajar (*Adversed Opinion*)

Opini ini diberikan jika auditor telah memperoleh bukti audit yang diperlukan, dan meyakini dalam laporan keuangan terdapat salah saji yang material yang berdampak pada laporan keuangan secara keseluruhan/mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

5. Pernyataan Menolak Memberikan Opini (*Disclaimer of Opinion*).

Opini diberikan jika auditor tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak. Hal ini dapat terjadi jika auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup, atau terdapat pembatasan ruang lingkup audit oleh pemerintah/perusahaan yang didalamnya mungkin terjadi salah saji material yang tidak terdeteksi yang akan berdampak pada laporan keuangan secara keseluruhan mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian yang dilakukan Mustikarini dan Fitriasaki (2012) yang meneliti tentang Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007, menyimpulkan semua variabel karakteristik pemerintah daerah (ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan pemerintah daerah, dan tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat) kecuali belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Dan menyarankan menggunakan belanja modal daripada belanja daerah dalam menjelaskan salah satu variabel dari karakteristik pemerintah daerah. Serta temuan audit berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Patrick (2007) tentang *The Determinants of Organizations Innovativeness: The Adoption of GASB 34 Pennsylvania Local Government*, menghasilkan kesimpulan *the propensity to innovate is strong and positively associated with the adoption of GASB 34, responsiveness to constituents strong and positively associated with the adoption of GASB 34, occupational specialization less strong (moderate) and positively associated with the adoption of GASB 34, functional differentiation less strong (moderate) and positively associated with the adoption of GASB 34, administrative Intensity less strong (moderate) and positively associated with the adoption of GASB 34, availability of Slack Resources less strong (moderate) and positively associated with the adoption of GASB 34, organizational size less strong (moderate) and positively associated with the adoption of GASB 34, and Interorganizational Interdependencies less strong (moderate) and positively associated with the adoption of GASB 34.*

Sumarjo (2010) tentang Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, menghasilkan kesimpulan ukuran (size)

pemerintah daerah, ukuran legislatif, *leverage* dan intergovernmental revenue secara parsial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan kemakmuran (*wealth*) secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Adapun secara simultan kelima variabel independen berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Sudarsana dan Rahardjo (2013) yang meneliti tentang Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, menunjukkan tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap skor kinerja pemerintah daerah, dan ukuran pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap skor kinerja pemerintah daerah. Sedangkan temuan audit berpengaruh negatif signifikan terhadap skor kinerja pemerintah daerah.

Marfiana dan Kurniasih (2013) yang meneliti pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan hasil pemeriksaan audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota, menyimpulkan tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dan belanja daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dan ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, dan opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan temuan audit dan ukuran legislatif berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Utomo (2015) tentang analisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah, menghasilkan kesimpulan berupa variabel ukuran pemerintah daerah dan tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Sedangkan variabel tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja

modal, *leverage*, dan temuan audit berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Kusumawardani (2012) meneliti tentang Pengaruh *Size*, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, *Leverage*, terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, menghasilkan kesimpulan berupa ukuran pemerintah daerah, ukuran legislatif, dan *leverage* secara parsial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan untuk tingkat kekayaan pemerintah daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, namun secara simultan ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan pemerintah daerah, ukuran legislatif dan *leverage* dinyatakan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Harumiati dan Payamta (2014) meneliti tentang Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2011, menghasilkan kesimpulan ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, dan belanja modal secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, sedangkan temuan audit secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah dan status daerah dinyatakan tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Adapun secara simultan ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja modal, temuan audit dan status daerah dinyatakan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Ara (2016) meneliti tentang Pengaruh Karakteristik Pemda dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemda Kabupaten di Pulau Sumba, menghasilkan kesimpulan tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, dan belanja modal secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap

kinerja pemerintah daerah, dan untuk variabel temuan audit secara parsial dinyatakan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Sedangkan secara simultan tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja modal, dan temuan audit secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Noviyanti dan Kiswanto (2016) meneliti tentang Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, menghasilkan kesimpulan berupa tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dan belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah dan ukuran parsial berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah dan temuan audit tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Mardianis dan Arum (2016) meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Daerah dan Opini Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Hasil penelitian ini menunjukkan secara simultan pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja daerah, dan opini audit BPK berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, namun secara parsial keempat variabel independen dinyatakan tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Masdiantini dan Erawati (2016) meneliti tentang Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, *Intergovernmental Revenue*, Temuan dan Opini Audit BPK pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan ukuran pemerintah daerah, dan opini audit BPK berpengaruh positif signifikan pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Sementara variabel kemakmuran, *intergovernmental revenue*, dan temuan audit BPK tidak berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah.

Prabowo dan Qowi (2017) meneliti tentang Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Pemeriksaan BPK terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2012. Hasil dari penelitian ini menunjukkan tingkat kekayaan pemerintah daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah, sedangkan tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja modal, dan temuan pemeriksaan BPK secara parsial berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah. Adapun secara simultan tingkat kekayaan pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja modal, dan temuan pemeriksaan BPK dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Panggalih (2017) meneliti tentang Pengaruh Rasio DAU, Rasio Belanja Modal, Opini Audit, dan Rasio Temuan Audit terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan opini audit berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah, sedangkan rasio DAU, rasio belanja modal, dan rasio temuan audit berpengaruh secara negatif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Pratiwi (2018) meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Aminah (2019) meneliti tentang Pengaruh *Size, Wealth, Intergovernmental Revenue*, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dan belanja

modal secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, dan secara parsial keempat variabel berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Adapun, Di bawah ini merupakan rangkuman dari beberapa penelitian terdahulu.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Patrick (2007)	<i>The Determinants of Organizations Innovativeness: The Adoption of GASB 34 Pennsylvania Local Government.</i>	<p><i>Independen:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Propensity to Innovate.</i> 2. <i>Responsiveness to Constituents.</i> 3. <i>Occupational Specialization.</i> 4. <i>Functional Differentiation.</i> 5. <i>Administrative Intensity.</i> 6. <i>Availability of Slack Resources</i> 7. <i>Organizational Size.</i> 8. <i>Interorganizational Interdependencies</i> <p><i>Dependen:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Organizational Innovativeness.</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>The propensity to innovate is strong and positively associated with the adoption of GASB 34.</i> 2. <i>Responsiveness to constituents strong and positively associated with the adoption of GASB 34.</i> 3. <i>Occupational Specialization less strong (moderate) and positively associated with the adoption of GASB 34.</i> 4. <i>Functional Differentiation less strong (moderate) and positively associated with the adoption of GASB 34.</i> 5. <i>Administrative Intensity less strong (moderate) and positively associated with the adoption of GASB 34.</i> 6. <i>Availability of Slack Resources less strong (moderate) and positively associated with the adoption of GASB 34.</i> 7. <i>Organizational Size less strong (moderate) and positively associated with the adoption of GASB 34.</i> 8. <i>Interorganizational Interdependencies less strong (moderate) and</i>

				<i>positively associated with the adoption of GASB 34.</i>
2.	Sumarjo (2010)	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia).	<p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran (Size) Pemerintah Daerah. 2. Kemakmuran (Wealth). 3. Ukuran Legislatif. 4. Leverage. 5. Intergovernmental Revenue. <p>Dependen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran (Size) pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 2. Kemakmuran (Wealth) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 3. Ukuran legislatif berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah 4. Leverage berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 5. Intergovernmental revenue berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 6. Variabel Independen berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
3.	Mustikarini dan Fitriyani (2012)	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun anggaran 2007.	<p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran Pemerintah Daerah. 2. Tingkat Kekayaan Daerah. 3. Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat. 4. Belanja Daerah. 5. Temuan Audit. <p>Dependen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja Pemerintah Daerah kabupaten/kota. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. 2. Tingkat Kekayaan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. 3. Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. 4. Belanja daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah. 5. Temuan audit berpengaruh negatif terhadap kinerja

4.	Kusumawardani (2012)	Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage, terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia.	<p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran Pemerintah Daerah (Size). 2. Tingkat Kekayaan Pemerintah Daerah (Wealth). 3. Ukuran Legislatif. 4. Leverage. <p>Dependen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. 	<p>pemerintah daerah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran pemerintah daerah (size) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 2. Tingkat kekayaan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 3. Ukuran legislatif berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 4. Leverage berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 5. Variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
5.	Sudarsana dan Rahahrdjo (2013)	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia).	<p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran Pemeintah Daerah. 2. Tingkat Kekayaan Daerah. 3. Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat. 4. Belanja Modal. 5. Temuan Audit. <p>Dependen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja Pemerintah Daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap skor kinerja pemerintah daerah. 2. Tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap skor kinerja pemerintah daerah. 3. Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat tidak berpengaruh terhadap skor kinerja pemerintah daerah. 4. Belanja modal tidak berpengaruh terhadap skor kinerja pemerintah daerah. 5. Temuan audit berpengaruh negatif signifikan terhadap skor kinerja pemerintah daerah.

6.	Marfiana dan Kurniasih (2013)	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	<p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran Pemerintah Daerah. 2. Tingkat Kekayaan Daerah. 3. Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat. 4. Belanja Daerah. 5. Ukuran Legislatif. 6. Temuan Audit. 7. Opini Audit. <p>Dependen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 2. Tingkat kekayaan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 3. Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 4. Belanja daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 5. Ukuran legislatif berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 6. Temuan audit berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 7. Opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
7.	Harumiati dan Payamta (2014)	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2011.	<p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ukura Pemerintah Daerah. 2. Tingkat Kekayaan Daerah. 3. Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat. 4. Belanja Modal. 5. Status Daerah. 6. Temuan Audit. <p>Dependen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja Pemerintah Daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. 2. Tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. 3. Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. 4. Belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

				<p>5. Status daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.</p> <p>6. Temuan audit berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.</p> <p>7. Variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap kinerja pemerintah daerah.</p>
8.	Utomo (2015)	Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2012).	<p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran Pemerintah Daerah. 2. Tingkat Kekayaan Daerah. 3. Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat. 4. Belanja Modal. 5. <i>Leverage</i>. 6. Temuan Audit BPK. <p>Dependen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja Pemerintah Kabupaten. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. 2. Tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja pemerintah daerah. 3. Tingkat ketergantungan pada pemerintah usat berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. 4. Belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. 5. <i>Leverage</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. 6. Temuan audit berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.
9.	Ara (2016)	Pengaruh Karakteristik Pemda dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemda Kabupaten di Pulau Sumba.	<p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Kekayaan Daerah. 2. Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat. 3. Belanja Modal. 4. Temuan Audit BPK. <p>Dependenden:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja Pemerintah Daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. 2. Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. 3. Belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah

				<p>daerah.</p> <p>4. Temuan audit berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja pemerintah Daerah.</p> <p>5. Variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.</p>
10.	Noviyanti dan Kiswanto (2016)	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	<p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran Pemerintah Daerah. 2. Tingkat Kekayaan Daerah. 3. Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat. 4. Belanja Daerah. 5. Ukuran Legislatif. 6. Temuan Audit. <p>Dependen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 2. Tingkat kekayaan daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 3. Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 4. Belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 5. Ukuran legislatif berpengaruh negati terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 6. Temuan audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
11.	Mardianis dan Arum (2016)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Daerah dan Opini Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.	<p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan Asli Daerah. 2. Dana Perimbangan. 3. Belanja Daerah. 4. Opini Audit BPK. <p>Dependen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja Pemerintah Daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. 2. Dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. 3. Belanja daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. 4. Opini audit BPK tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. 5. Variabel Independen berpengaruh secara simultan terhadap

				kinerja pemerintah daerah.
12.	Masdiantini dan Erawati (2016)	Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, <i>Intergovernmental Revenue</i> , Temuan dan Opini Audit BPK pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	<p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran Pemerintah Daerah. 2. Kemakmuran. 3. <i>Intergovernmental Revenue</i>. 4. Temuan Audit. 5. Opini Audit BPK. <p>Dependen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 2. Kemakmuran tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 3. <i>Intergovernmental revenue</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 4. Temuan audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 5. Opini Audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
13.	Prabowo dan Qowi (2017)	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Pemeriksaan BPK terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2012.	<p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Kekayaan Pemerintah Daerah. 2. Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat. 3. Belanja Modal. 4. Temuan Pemeriksaan BPK. <p>Dependen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja Pemerintah Daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kekayaan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. 2. Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah. 3. Belanja modal berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah. 4. Temuan pemeriksaan BPK berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah. 5. Variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.
14.	Panggalih (2017)	Pengaruh Rasio DAU, Rasio Belanja Modal, Opini Audit, dan Rasio Temuan Audit Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.	<p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio DAU. 2. Rasio Belanja Modal. 3. Opini Audit. 4. Rasio Temuan Audit. <p>Dependen:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio DAU berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah. 2. Rasio belanja modal berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah.

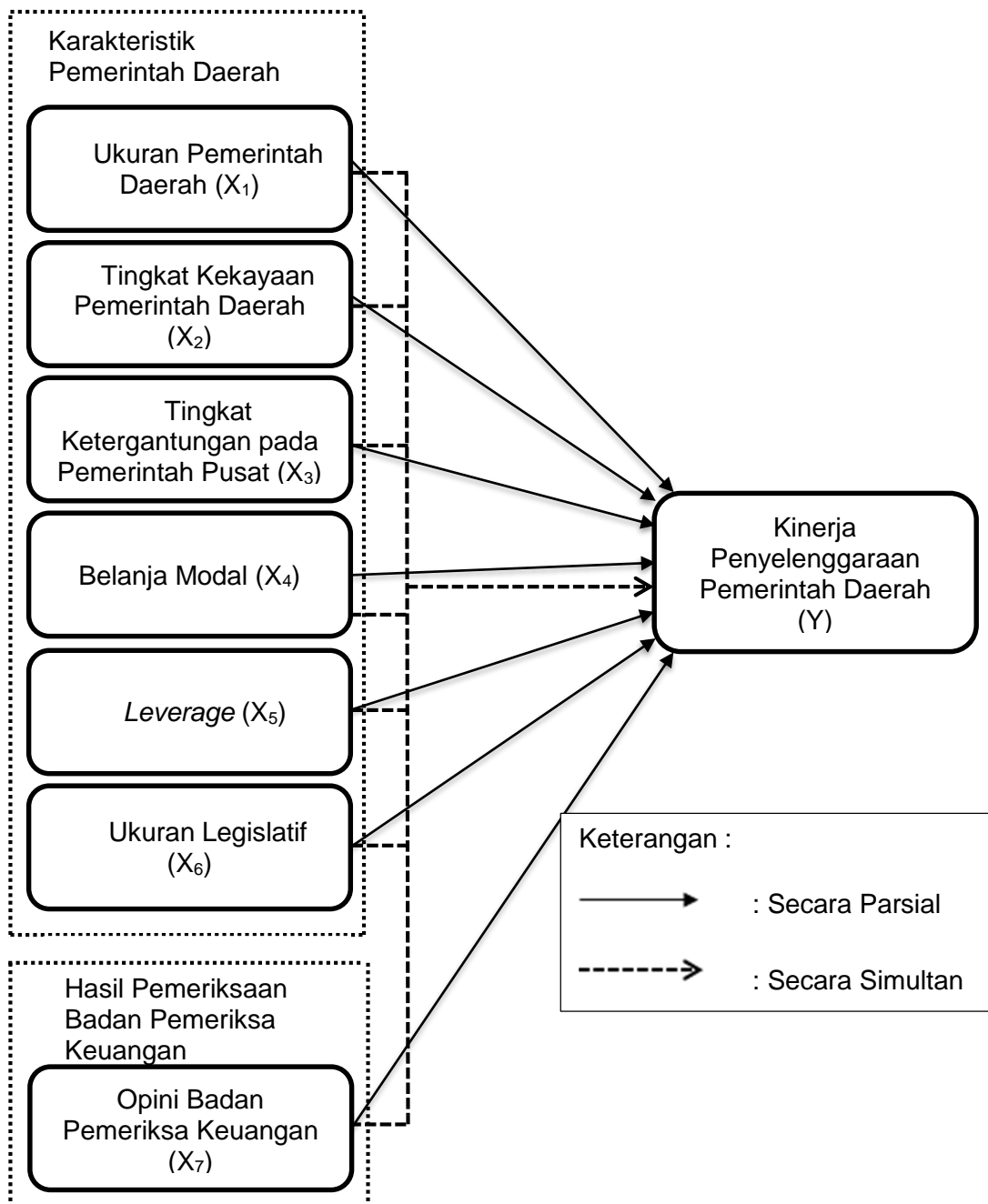
			1. Kinerja Pemerintah Daerah.	3. Rasio temuan audit berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah. 4. Opini audit berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.
14.	Pratiwi (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018.	Independen: 1. Pendapatan Asli Daerah. 2. Dana Perimbangan. 3. Belanja Modal. Dependen: 1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	1. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 2. Dana perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 3. Belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
15.	Aminah (2019)	Pengaruh Size, Wealth, Intergovernmental Revenue, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.	Independen: 1. Ukuran Pemerintah Daerah (Size). 2. Tingkat Kekayaan Pemerintah Daerah (Wealth). 3. Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat (Intergovernmental Revenue). 4. Belanja Modal. Dependen: 1. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.	1. Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. 2. Tingkat kekayaan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. 3. Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. 4. Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. 5. Variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Sumber: Berbagai Penelitian Terdahulu

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya atau seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Maka diungkapkan dengan suatu kerangka pikir yang berfungsi sebagai penuntun, alur pikir, dan dasar dalam penelitian yang secara diagram sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan suatu tanggapan yang digunakan sebagai dasar dalam pembuatan keputusan solusi persoalan dan juga untuk dasar penelitian lebih lanjut.

2.4.1 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Menurut Mardiasmo (2002) tujuan utama organisasi sektor publik (pemerintah daerah) adalah pemberian pelayanan publik (*public service*), seperti: pendidikan, kesehatan masyarakat, keamanan, penegakan hukum, transportasi publik, dan penyediaan barang kebutuhan publik (misalnya: penyediaan bahan kebutuhan masyarakat). Oleh karena itu, pemenuhan layanan dasar sarana dan prasarana infrastruktur sangat penting bagi pemerintah daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sarana dan prasarana ini bagi pemerintah daerah dikategorikan sebagai aset. Sehingga semakin besarnya ukuran suatu pemerintah daerah yang diproyeksikan dengan total aset maka diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik pula. Hal ini dipertegas oleh hasil penelitian Mustikarini dan Fitriasaki (2012), Utomo (2015), dan Aminah (2019) yang menemukan ukuran pemerintah daerah yang diukur dengan total aset berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Serta penelitian Sumarjo (2010) dan Kusumawardani (2012) yang menyimpulkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis pada penelitian ini adalah :

H₁ : Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.4.2 Pengaruh Tingkat Kekayaan Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Menurut Mardiasmo (2002:8-9) Selain memberikan pelayanan kepada publik yang menjadi tujuan utama organisasi sektor publik, terdapat juga tujuan finansial yang tentunya berbeda dari sektor swasta. Organisasi sektor publik berusaha untuk meningkatkan penerimaan negara, peningkatan laba pada perusahaan-perusahaan milik negara atau milik daerah (BUMN/BUMD), upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah contoh adanya tujuan finansial pada organisasi sektor publik. Jika pada sektor swasta tujuan finansial diorientasikan pada maksimalisasi laba untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham, maka pada sektor publik tujuan finansial diorientasikan untuk maksimalisasi pelayanan publik, karena untuk memberikan pelayanan publik diperlukan dana.

Oleh karena itu tingkat kekayaan suatu pemerintah daerah dapat dilihat dari kemampuan suatu daerah membiayai penyelenggaraan pemerintahannya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun salah satu sumber pendapatan daerah dan hanya satu-satunya sumber pendapatan yang berasal dari sumber ekonomi suatu daerah adalah PAD. Semakin tinggi PAD suatu daerah terhadap total pendapatan daerah, maka semakin kecil pula ketergantungannya terhadap pihak eksternal yang dimana ini menggambarkan semakin baiknya kemampuan suatu daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahannya sehingga akan berdampak pada maksimalisasi pelayanan publik dan berefek kepada semakin baiknya kinerja suatu pemerintah daerah.

Uraian diatas didukung oleh hasil penelitian Mustikarini dan Fitriyani (2012), Utomo (2015), Sudarsana dan Rahardjo (2013), Aminah (2019), dan Ara (2016) yang menemukan bahwa tingkat kekayaan pemerintah daerah yang diukur

dengan perbandingan total PAD terhadap total pendapatan suatu daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu hipotesis pada penelitian ini adalah :

H₂ : Tingkat kekayaan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.4.3 Pengaruh Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Data yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada Tahun 2018 menunjukkan secara rata-rata nasional ketergantungan pendapatan daerah terhadap dana perimbangan sebesar 60,9%, sementara kontribusi PAD hanya sebesar 24,6 % terhadap total Pendapatan Daerah. Hal ini menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah dalam hal pendanaan pada pemerintah pusat masih sangat tinggi. Bentuk ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat ini diwujudkan dalam bentuk penerimaan transfer DAU yang merupakan salah satu elemen yang terdapat di dalam dana perimbangan selain DAK dan DBH. Adapun proporsi DAU dalam dana perimbangan sebesar 60,3%. Hal tersebut menunjukkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat paling tepat dilihat melalui besaran DAU yang diterima oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Menurut Marfiana dan Kurniasih (2013) DAU diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan PAD-nya. DAU ini bersifat *Block Grant* yang artinya penggunaan DAU diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan prioritas, kepentingan, dan kebutuhan daerah masing-masing yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Sudarsana dan Rahardjo (2013) menyatakan semakin besarnya penerimaan DAU oleh suatu daerah maka

pemerintah pusat akan lebih memantau pelaksanaan dari alokasi DAU dibanding dengan daerah yang lebih sedikit penerimaannya. Hal ini memotivasi pemerintah daerah untuk berkinerja lebih baik karena pengawasan dari pemerintah pusat lebih besar. Dengan demikian, semakin tinggi DAU dari pemerintah pusat maka diharapkan semakin baik pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakatnya sehingga kinerja pemerintah daerah juga semakin meningkat.

Uraian diatas didukung oleh hasil penelitian Mustikarini dan Fitriyani (2012), Aminah (2019), dan Ara (2016) yang menunjukkan tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat yang diukur dengan perbandingan total dana alokasi umum terhadap total pendapatan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Serta penelitian Sumarjo (2010), Noviyanti dan Kiswanto (2016), dan Marfiana dan Kurniasih (2013) yang menemukan tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₃ : Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

2.4.4 Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya pemenuhan layanan dasar sarana dan prasarana infrastruktur sangat penting bagi pemerintah daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bagi pemerintah daerah pemenuhan layanan dasar sarana dan prasarana infrastruktur diwujudkan melalui belanja modal yang kemudian dicatat sebagai aset pemerintah daerah. Menurut PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara mendefinisikan belanja modal sebagai pengeluaran anggaran untuk perolehan

aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Adapun contoh belanja modal antara lain berupa belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Penelitian yang dilakukan Mustikarini dan Fitriasari (2012) menyarankan penggunaan variabel belanja modal dalam melihat pengaruhnya terhadap kinerja pemerintah daerah, karena belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah erat kaitannya dengan penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, semakin besar belanja modal suatu daerah maka pemenuhan berupa pembelian/pengadaan atau pembangunan layanan dasar sarana dan prasarana infrastruktur semakin banyak sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat akan semakin baik sehingga kinerja pemerintah daerah akan lebih baik.

Hasil penelitian Aminah (2019) dan Ara (2016) menyimpulkan belanja modal memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah, hal ini menunjukkan kegiatan belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah untuk membiayai pembelian/pengadaan atau pembangun layanan dasar sarana dan prasarana infrastruktur berdampak kepada meningkatnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, sekaligus menunjukkan semakin baik kinerja suatu pemerintah daerah. Serta penelitian yang dilakukan Pratiwi (2018), Andirfa (2016), dan Asnidar dan Hardi (2019) yang menyimpulkan belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, hal tersebut menjelaskan semakin besar belanja modal pemerintah daerah maka semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini:

H₄ : Belanja Modal berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

2.4.5 Pengaruh *Leverage* terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Rasio *leverage* digunakan untuk melihat kemampuan suatu entitas dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya, dengan melihat perbandingan antara utang dan modal (*debt to equity*) suatu entitas tertentu. Menurut Ramdhani (2013) menjelaskan rasio *leverage* berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang/pinjaman. Semakin besar rasio *debt to equity* menunjukkan makin besarnya resiko yang ditanggung atas kegagalan pembayaran utang/pinjaman. Sejalan dengan hal itu Kusumawardani (2012) menjelaskan, semakin besar *leverage* suatu entitas maka makin besar ketergantungan entitas tersebut pada pihak luar, dan karena semakin besar utang yang dimiliki entitas tersebut maka hal itu menunjukkan semakin rendah kinerja keuangan entitas tersebut.

Uraian diatas didukung oleh hasil penelitian Utomo (2015) yang menemukan bahwa semakin tinggi *leverage* pemerintah daerah yang diukur dengan perbandingan antara utang terhadap modal suatu pemerintah daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota. Serta penelitian Perwitasari (2010) dan Darmanto (2012) yang menyimpulkan semakin tinggi tingkat rasio *leverage* suatu pemerintah daerah maka hal itu menunjukkan semakin rendahnya kinerja pemerintah daerah tersebut. Oleh karena itu hipotesis pada penelitian ini adalah:

H₅ : *Leverage* berpengaruh negatif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.4.6 Pengaruh Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga yang dibentuk baik di daerah provinsi maupun di daerah kabupaten/kota yang menjalankan kekuasaan legislatif, dan karena itu biasa disebut dengan lembaga legislatif di daerah. Salah satu fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif di daerah adalah melakukan pengawasan. DPRD melakukan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan pelaksanaan APBD sehingga dapat dipergunakan dengan baik untuk kepentingan masyarakat. Adapun jumlah dari anggota DPRD satu daerah dan yang lainnya berbeda-beda tergantung dari kriteria dan peraturan yang berlaku. Menurut UU No. 17 Tahun 2014 anggota DPRD kabupaten/kota berjumlah paling sedikit 20 orang dan paling banyak 50 orang.

Semakin besar ukuran legislatif suatu daerah yang ditunjukkan dengan semakin banyaknya anggota DPRD suatu kabupaten/kota maka diharapkan akan semakin besar tingkat pengawasan yang dilakukan oleh legislatif suatu daerah yang hal ini akan mendorong pemerintah daerah untuk bekerja lebih baik dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan Sumarjo (2010) serta Noviyanti dan Kiswanto (2016) menyatakan semakin banyaknya anggota legislatif dalam hal ini anggota DPRD suatu pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap pemerintah daerah tersebut sehingga berdampak pada meningkatnya kinerja pemerintah daerah.

Uraian di atas didukung oleh hasil penelitian Kusumawardini (2012) dan Hutapea dan Widyaningsih (2017) yang menyimpulkan ukuran legislatif yang diprosikan dengan jumlah anggota DPRD berpengaruh positif terhadap kinerja

keuangan pemerintah daerah, hal ini menunjukkan pengawasan yang dilakukan DPRD mendorong pemerintah daerah untuk bekerja lebih baik. Kemudian penelitian yang dilakukan Yani (2013) yang menyimpulkan pengawasan yang dilakukan DPRD kepada pemerintah daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja akuntabilitas pemerintah daerah. Oleh karena itu, hipotesis pada penelitian ini adalah :

H₆ : Ukuran Legislatif berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.4.7 Pengaruh Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Opini yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan atas hasil pemeriksaan yang diberikan mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah. Opini yang diberikan BPK terdiri dari 5 (lima) jenis opini, yaitu : Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

Setiap tahun pemerintah daerah akan memperoleh opini terkait hasil pemeriksaan atas laporan keuangan yang akan mereka sampaikan kepada DPRD sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pengelolaan keuangan daerah (APBD) kepada masyarakat. Semakin baik opini yang didapat suatu pemerintah daerah maka hal ini menunjukkan semakin kecil permasalahan keuangan, dan semakin baik akuntabilitas dari sebuah pemerintahan. Menurut Marfiana (2013) Opini BPK dapat menjadi tolak ukur (indikator) untuk menilai akuntabilitas sebuah entitas pemerintah. Opini ini dapat menaikkan ataupun menurunkan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan atas pelaporan yang disajikan oleh pihak

yang diaudit, dalam hal ini entitas pemerintah daerah. Dengan kata lain, semakin wajar opini audit BPK maka seharusnya menunjukkan semakin tingginya kinerja suatu pemerintah daerah.

Uraian diatas didukung oleh hasil penelitian Mardianis dan Arum (2017) dan Panggalih (2017) yang menyimpulkan Opini BPK berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Serta penelitian yang dilakukan Masdiantini dan Erawati (2016) yang menemukan Opini BPK memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu hipotesis pada penelitian ini adalah :

H₇ : Opini BPK berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.4.8 Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Indonesia

Isi dari LPPD yang digunakan sebagai sumber informasi utama dari EKPPD sangat tergantung dengan urusan yang menjadi tanggung jawabnya dan karakteristik dari masing-masing pemerintah daerah tersebut (Mustikarini dan Fitriasari, 2012). Hal itu karena ruang lingkup dari LPPD provinsi dan kabupaten/kota harus mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan yang secara nyata ada di daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah (PP No. 3 Tahun 2007)

Menurut Marfiana (2013) Opini Badan Pemeriksa Keuangan dapat menjadi tolak ukur (indikator) untuk menilai akuntabilitas sebuah entitas pemerintah. Hal

ini karena semakin baik opini yang didapat suatu pemerintah daerah maka hal ini menunjukkan semakin kecil permasalahan keuangan, dan semakin baik akuntabilitas dari sebuah pemerintahan.

Uraian diatas didukung oleh hasil penelitian Harumiati dan Payamta (2014), Mardianis dan Arum (2017), dan Ara (2016) yang menunjukkan karakteristik pemerintah daerah dan hasil pemeriksaan BPK secara simultan berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₈: Karakteristik pemerintah daerah dan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berpengaruh secara simultan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian (*hypotheses testing*) yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang diajukan oleh peneliti mengenai pengaruh karakteristik pemerintah daerah yang diukur dengan ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja modal, *leverage*, ukuran legislatif, opini BPK, terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Menurut Sekaran (2016:37) Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan melalui sumber yang telah ada. Sumber data sekunder bisa berupa buletin statistik, publikasi pemerintah, informasi yang diterbitkan atau tidak dipublikasikan yang tersedia baik di dalam maupun di luar organisasi, situs web perusahaan, dan internet. Data untuk pemeringkatan kinerja pemerintah daerah diperoleh dari keputusan menteri dalam negeri yang diakses melalui www.kemendagri.go.id, variabel ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja modal, dan *leverage* diperoleh dari website Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Badan Pusat Statistik (BPS), yang diakses melalui www.djpk.kemenkeu.go.id dan www.bps.go.id, sedangkan untuk variabel ukuran legislatif diperoleh dari website Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari setiap kabupaten/kota, website resmi masing-masing pemerintah daerah, dan website lain yang menyediakan data yang dibutuhkan dan untuk variabel opini BPK diperoleh dari website Badan Pemeriksa Keuangan, yang diakses melalui www.bpk.go.id.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar dengan menggunakan data sekunder. Data yang digunakan yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2017, Laporan Neraca Pemerintah Daerah kabupaten/kota 2017, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I dan II Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2018, daftar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota periode 2014-2019 dan pemeringkatan kinerja pemerintah daerah tahun 2018

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

3.3.1 Populasi Penelitian

Populasi mengacu pada seluruh kelompok orang, peristiwa, atau hal-hal menarik yang ingin diselidiki/diteliti oleh peneliti (Sekaran, 2016:236). Sedangkan populasi menurut Sugiyono (2014:119) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah kabupaten/kota seluruh Indonesia pada tahun 2019 yang berjumlah 508 kabupaten/kota.

3.3.2 Sampel Penelitian

Sampel adalah sebagian dari populasi yang terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi (Sekaran, 2016:237). Dengan sampel peneliti diharapkan mampu memberikan kesimpulan yang dapat digeneralisasikan terhadap populasi penelitian. Sampel pada penelitian ini merupakan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2017 dan memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 309 kabupaten/kota.

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan *non probability sampling*, yaitu *purposive sampling*. Beberapa pertimbangan yang dilakukan dalam pengambilan sampel penelitian ini antara lain:

1. Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional untuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2017.
2. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki semua data yang lengkap meliputi data dari realisasi APBD tahun 2017 untuk mendapatkan jumlah pendapatan daerah, jumlah PAD, jumlah DAU, jumlah belanja daerah, dan jumlah belanja modal.
3. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki laporan neraca tahun 2017 yang seimbang, yakni tidak terdapat selisih antara aktiva dan passiva untuk mendapatkan total aset tetap, hutang dan ekuitas.
4. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh opini dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk tahun anggaran 2017.
5. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki data jumlah anggota DPRD periode 2014-2019.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Peneliti ini menggunakan jenis data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan melalui sumber yang telah ada (Sekaran, 2016:37). Adapun alasan penggunaan data sekunder dengan pertimbangan bahwa data ini mempunyai validitas data yang dijamin oleh pihak lain sehingga handal untuk digunakan dalam penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari pemeringkatan kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota, melalui situs www.kemendagri.go.id, IHPS BPK, melalui situs www.bpk.go.id, realisasi APBD dan laporan neraca pemerintah daerah kabupaten/kota, diperoleh melalui situs www.bps.go.id dan

www.djpk.kemenkeu.go.id, serta jumlah anggota anggota DPRD diperoleh dari website Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari setiap kabupaten/kota, website resmi masing-masing pemerintah daerah, dan website lain yang menyediakan data yang dibutuhkan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah dengan dokumentasi. Data yang digunakan sebagai berikut:

1. Metode dokumentasi, merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Dokumen yang telah diperoleh kemudian akan dianalisis, diuraikan, dibandingkan, dan dipadukan menjadi hasil kajian yang sistematis, padu, dan utuh. Penelitian dengan teknik dokumentasi tidak hanya berisi kumpulan kutipan dari sumber data yang diperoleh tetapi juga merupakan hasil dari analisis peneliti saat ini.
2. Penelitian kepustakaan, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti melalui buku, jurnal, tesis, skripsi, dan internet untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.

3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan dua variabel, yaitu:

3.6.1. Variabel Penelitian

Penelitian ini terdiri dari dua jenis variabel yaitu variabel bebas (*independent variable*) dan variabel terikat (*dependent variable*). Variabel independen atau bebas merupakan variabel yang diduga mempengaruhi variabel terikat secara

positif ataupun negatif. Variabel dependen atau terikat merupakan variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel lainnya daerah.

3.6.1.1. Variabel Bebas (*Dependent Variable*)

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel utama dalam penelitian (Sekaran, 2016:73). Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan atau memprediksi variabel dependen. Variabel dependen merupakan variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel lainnya atau variabel yang terikat oleh variabel lainnya. Variabel terikat atau dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

3.6.1.2. Variabel Terikat (*Independent Variable*)

Variabel independen atau variabel bebas adalah penyebab yang memengaruhi variabel dependen secara positif maupun negatif (Sekaran, 2016:74). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja modal, *leverage*, ukuran legislatif, dan opini Badan Pemeriksa Keuangan.

3.6.2. Definisi Operasional

Definisi operasional variabel merupakan penarikan batasan yang lebih menjelaskan ciri-ciri spesifik yang lebih substantif dari suatu konsep. Definisi operasional dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut.

3.6.2.1. Variabel Dependen

3.6.2.1.1. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam penelitian ini adalah skor dan status kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota yang berasal dari laporan hasil evaluasi pemeringkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan LPPD tingkat nasional dengan range nilai 0-4. Berikut tabel yang menerangkan status yang diperoleh oleh setiap pemerintah daerah berdasarkan nilai yang diperoleh dari EKPPD.

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Range Nilai EKPPD	Status/Keterangan
3,01 – 4	Sangat Tinggi
2,01 – 3	Tinggi
1,01 – 2	Sedang
0 – 1	Rendah

Evaluasi Pemeringkatan kinerja Pemerintah daerah yang digunakan dalam penelitian ini adalah EKPPD Tahun 2018 untuk LPPD tahun 2017 yang ditetapkan 31 Desember 2018, dan diumumkan pada Hari Otonomi daerah tanggal 25 April 2019 di Banyuwangi, Jawa Timur oleh Kementerian Dalam Negeri.

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah = Skor EKPPD

3.6.2.2. Variabel Independen

3.6.2.2.1. Ukuran Pemerintah Daerah

Menurut Patrick (2007) ukuran sebuah organisasi dapat diukur dengan berbagai cara, antara lain jumlah karyawan (*a measure of human capital*), total aset (*a measure of fiscal resources*), tingkat kapasitas (*a measure of capacity*), dan tingkat produksi (*a measure of volume*). Penelitian yang dilakukan Sumarjo (2010), Mustikarini dan Fitriasaki (2012), Marfiana dan Kurniasih (2013), dan Sudarsana (2013) menjelaskan ukuran pemerintah daerah berdasarkan jumlah total aset yang dimiliki. Dalam Penelitian ini ukuran pemerintah daerah ditunjukkan dengan *Logaritma natural* (Ln) dari Total Aset (TA) pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan besarnya total aset masing-masing pemerintah daerah berbeda bahkan memiliki selisih yang besar, sehingga dapat menyebabkan nilai yang ekstrem. Untuk menghindari adanya data yang tidak normal maka data total aset perlu di Ln kan. Pertimbangan pengukuran ini karena nilai aktiva lebih stabil daripada nilai penjualan bersih dan kapitalisasi pasar (Sumarjo, 2010).

$$\text{Ukuran Pemerintah Daerah} = \text{Ln Total Aset}$$

3.6.2.2.2. Tingkat Kekayaan Pemerintah Daerah

Tingkat Kekayaan Pemerintah Daerah dapat dilihat dari kemampuan suatu daerah membiayai penyelenggaraan pemerintahannya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun salah satu sumber pendapatan daerah dan hanya satu-satunya sumber pendapatan yang berasal dari sumber ekonomi suatu daerah adalah PAD. Berdasarkan penelitian Mustikarini dan Fitriasaki (2012), dan Sumarjo (2010) tingkat kekayaan pemerintah daerah dapat diukur berdasarkan perbandingan total PAD suatu

pemerintah daerah terhadap total pendapatannya. Semakin tinggi PAD suatu daerah terhadap total pendapatan daerah, maka semakin kecil pula ketergantungannya terhadap pihak eksternal yang dimana ini menggambarkan semakin baiknya kemampuan suatu daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahannya. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Maka pada penelitian ini tingkat kekayaan pemerintah daerah diukur dengan rumus:

$$\text{Tingkat Kekayaan Pemerintah Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

3.6.2.2.3. Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat

Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dapat dilihat dari jumlah DAU yang diterima suatu daerah. DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. DAU untuk masing-masing Pemerintah Daerah dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat diukur dengan proksi yang sama dalam penelitian Patrick (2007) yang menggunakan perbandingan total dana transfer dari pemerintah pusat terhadap total pendapatan dalam mengukur tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat.

$$\text{Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat} = \frac{\text{Dana Alokasi Khusus}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

3.6.2.2.4. Belanja Modal

Menurut PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mendefinisikan Belanja modal sebagai pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Jumlah Belanja Modal untuk masing-masing Pemerintah Daerah dapat dilihat dari pos belanja langsung dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2011) menyatakan rasio belanja modal terhadap total belanja daerah mencerminkan porsi belanja daerah yang dibelanjakan untuk membiayai belanja modal. Maka dalam penelitian ini belanja modal diukur dengan rumus:

$$\text{Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

3.6.2.2.5. Leverage

Menurut Hanafi dan Halim (2012:75) menjelaskan rasio *leverage* sebagai rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan (entitas) dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Leverage dalam penelitian ini mengacu kepada penelitian Kusumawardini (2012) yang mendefinisikan *leverage* sebagai perbandingan antara hutang dan modal. Perbandingan antara hutang dan modal ini biasa disebut sebagai *Debt to Equity Ratio*. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa banyak proporsi dari modal perusahaan yang sumber pendanaannya berasal dari pinjaman atau kredit. Semakin tinggi hutang maka semakin besar risiko finansial suatu entitas. Jumlah hutang dan jumlah modal (Ekuitas) untuk masing-masing pemerintah daerah dapat dilihat dalam laporan neraca pemerintah daerah.

$$\text{Leverage} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

3.6.2.2.6. Ukuran Legislatif

Lembaga legislatif di daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh DPRD sebagaimana tertuang dalam UU No. 17 Tahun 2014. DPRD kabupaten/kota memiliki fungsi berupa, legislasi, anggaran, dan pengawasan. Oleh karena itu lembaga legislatif dalam hal ini DPRD merupakan lembaga yang memiliki posisi dan peran strategis terkait dengan pengawasan keuangan daerah agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran yang ada untuk dapat digunakan dengan baik demi kepentingan masyarakat. Dalam penelitian ini ukuran legislatif dijelaskan melalui jumlah anggota DPRD suatu daerah. Hal tersebut seperti dengan penelitian yang dilakukan Sumarjo (2010) dan Marfiana dan Kurniasih (2013) yang menjelaskan ukuran legislatif berdasarkan jumlah anggota DPRD suatu daerah.

$$\text{Ukuran Legislatif} = \text{Jumlah Anggota DPRD}$$

3.6.2.2.7. Opini Badan Pemeriksa Keuangan

Opini yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan atas hasil pemeriksaan yang diberikan mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah. Opini yang diberikan BPK terdiri dari 5 (lima) jenis opini, yaitu: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Opini yang diterima oleh masing-masing pemerintah daerah dapat dilihat dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan semester I dan II Tahun 2018 untuk

tahun anggaran 2017. Dalam penelitian ini Opini BPK diukur dengan menggunakan skala 5 poin dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2 Pengukuran Opini Audit

Opini Audit BPK atas LKPD Kabupaten/Kota	Skala Pengukuran
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	5
Wajar Tanpa Pengecualian – Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP)	4
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	3
Tidak Memberikan Pendapat (TMP)	2
Tidak Wajar (TW)	1

3.7 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terlebih dahulu dilakukan dengan statistik deskriptif dengan tujuan mengetahui dispersi dan distribusi data, adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda (*Multiple Linear Regression Analysis*) dengan bantuan program *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) versi 23, Analisis ini dimaksudkan untuk mengungkapkan pengaruh antara beberapa variabel independen dengan variabel dependen. Sebelum melakukan analisis regresi, perlu dilakukan uji asumsi klasik dengan tujuan menguji kelayakan model regresi. Uji Asumsi Klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedasitas.

3.7.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang menjadikan sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah untuk dipahami, yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), minimum, maksimum, standar deviasi, *varians*, sum, *range*, dan kurtosis dan *skewness* (kemencengan distribusi) dari masing-masing variabel yang digunakan antara lain ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat,

belanja modal, *leverage*, ukuran legislatif, opini Badan Pemeriksa Keuangan. Statistik deskriptif menggambarkan ukuran numerik dari data sampel yang penting. Pengujian statistik deskriptif ini menggunakan *software Statistical Package for the Sosial Science (SPSS)* versi 23.

3.7.2. Uji Asumsi Klasik

Model regresi harus memenuhi beberapa asumsi yang disebut asumsi klasik. Uji asumsi klasik dimaksudkan agar menghindari perolehan yang bias. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas.

3.7.2.1. Uji Normalitas

Uji asumsi ini akan menguji data variabel independen (X) dan data variabel dependen (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan, apakah berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal (Sunyoto, 2013:92). Uji ini bertujuan untuk menguji apakah ada variabel pengganggu atau variabel residual dalam model regresi. Uji normalitas data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis grafik dan uji *one-sample Kolmogrov-Smirnov*. Pengambilan keputusan dengan analisa grafik yang digunakan pada penelitian ini adalah uji normal *probability plot*. Uji normal *probability plot* dikatakan berdistrusi normal jika garis data rill mengikuti garis diagonal dan cara ini dianggap lebih handal daripada grafik histogram karena cara ini membandingkan data rill dengan data distribusi normal otomatis dengan komputer secara kumulatif (Sunyoto, 2013:96). Untuk uji *Kolmogrov-Smirnov* dikatakan berdistrubsi normal jika *asymptomatic significan data* lebih besar daripada 0.05 ($p > 0.05$).

3.7.2.2. Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2016:103) mengemukakan bahwa uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas (*independent*) yang satu dengan variabel lainnya.

Oleh karena itu, untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF), dengan dasar sebagai berikut:

1. Jika nilai *tolerance* > 0.10 dan nilai VIF < 10 maka dapat dikatakan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.
2. Jika nilai *tolerance* < 0.10 dan nilai VIF > 10 maka dapat dikatakan bahwa ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

3.7.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat sama atau tidaknya varians dan residual dari observasi yang satu dengan observasi yang lain (Ghozali, 2016:134). Jika residualnya mempunyai varians yang sama, maka terjadi homoskedastisitas. Apabila variansnya tidak sama maka terjadi heteroskedastisitas. Hasil yang diharapkan adalah homoskedastisitas. Heteroskedastisitas terjadi jika pada *scatterplot* titik-titiknya mempunyai pola teratur, baik menyempit, melebar maupun bergelombang-gelombang. Sementara homoskedastisitas terjadi jika pada scatterplot titik-titik hasil pengolahan data menyebar di bawah maupun di atas titik origin (angka nol) pada sumbu Y dan titik mempunyai pola teratur.

3.7.3. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan model analisis regresi linear berganda, uji koefisien determinasi (R^2) dan uji statistik. Untuk menguji hipotesis dengan uji statistik tentang Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Indonesia digunakan dua bentuk pengujian hipotesis yaitu secara simultan dengan uji F untuk melihat karakteristik pemerintah daerah dan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, dan secara parsial dengan uji t untuk melihat pengaruh masing-masing variabel terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Indonesia.

3.7.3.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen yang digunakan untuk memprediksi atau meramalkan satu nilai variabel dependen berdasarkan variabel independen (Priyanto, 2014:80). Adapun persamaan umum dari regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1 \ln TA + b_2 PAD + b_3 DAU + b_4 BM + b_5 LEV + b_6 DPRD + b_7 OP + e$$

Keterangan:

Y = Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

TA = Variabel Ukuran Pemerintah Daerah

PAD = Variabel Tingkat Kekayaan Pemerintah Daerah

DAU = Variabel Tingkat Ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat

BM = Variabel Belanja Modal

Lev = Variabel *Leverage*

DPRD = Variabel Ukuran Legislatif

OP = Variabel Opini Badan Pemeriksa Keuangan

- α = Konstanta
- b_x = Koefisien Regresi Variabel Independen
- e = Faktor pengganggu atau error

3.7.3.2 Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian koefisien determinansi (R^2) digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variabel-variabel independen (Ghozali, 2016:95). Tingkat ketepatan regresi dinyatakan dalam koefisien determinasi majemuk (R^2) yang nilainya antara 0 sampai dengan 1. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen. Jika dalam suatu model terdapat lebih dari dua variabel independen, maka lebih baik menggunakan nilai *adjusted* R^2 .

3.7.3.3 Pengujian Parsial (Uji t)

Hasil uji t akan membuktikan bahwa suatu variabel independen dapat menjelaskan secara signifikan variabel dependen atau tidak. Pengujian parsial digunakan untuk menganalisis bila peneliti bermaksud mengetahui hubungan antara variabel independen dan dependen (Sugiyono, 2016:235). Statistik uji t digunakan untuk menguji secara sendiri-sendiri hubungan antara variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Adapun langkah-langkah dalam pengambilan keputusan untuk uji t adalah sebagai berikut.

1. $H_0 : \beta = 0$, ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pemerintah pusat, belanja modal, *leverage*, ukuran legislatif, dan opini Badan Pemeriksa Keuangan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia.

2. $H_a : \beta \neq 0$, tingkat kekayaan pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pemerintah pusat, belanja modal, *leverage*, ukuran legislatif, dan opini Badan Pemeriksa Keuangan berpengaruh secara parsial terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia.

Untuk mencari t tabel dihitung dengan $df = n - k - 1$, dimana n adalah jumlah responden, k adalah jumlah variabel serta taraf signifikansi 5 %. Nilai t tabel dapat dilihat dengan menggunakan tabel t. Dasar pengambilan keputusan adalah.

1. Jika t hitung $>$ t tabel, maka H_a diterima dan H_o ditolak
2. Jika t hitung $<$ t tabel, maka H_a ditolak dan H_o diterima

Keputusan statistik hitung dan statistik tabel dapat juga dilakukan berdasarkan probabilitas.

1. Jika probabilitas $>$ tingkat signifikan, maka H_a diterima dan H_o ditolak.
2. Jika probabilitas $<$ tingkat signifikan, maka H_a ditolak dan H_o diterima.

3.7.3.5 Pengujian Simultan (Uji f)

Uji f digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen, sehingga dapat dideteksi apakah seluruh variabel independen berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian ini melibatkan ketujuh variabel independen (ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja modal, *leverage*, ukuran legislatif, dan opini Badan Pemeriksa Keuangan) terhadap variabel dependen (kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah) dalam menguji ada tidaknya pengaruh secara bersama-sama. Dalam membuktikan hipotesis, maka peneliti menggunakan uji f. Uji f digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan dengan

membandingkan F_{hitung} dan F_{tabel} . Untuk mencari f tabel dihitung dengan $df_1 = k - 1$ dan $df_2 = n - k$ dimana n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel serta taraf signifikansi 5 %. Nilai f tabel dapat dilihat dengan menggunakan tabel f . Dengan cara pengambilan kesimpulan sebagai berikut:

1. Menentukan *Level of Significance* (a).

Pada tabel Analysis of Variance (ANOVA) didapat uji f yang menguji semua sub variabel independen yang akan mempengaruhi persamaan regresi. Dengan *level of significance* = 5 %

2. Kriteria Pengujian

Berdasarkan perbandingan Nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} . Dasar pengambilan keputusan adalah.

- a. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_a diterima dan H_o ditolak
- b. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_a ditolak dan H_o diterima

Berdasarkan perbandingan nilai signifikansi (Sig.) dari output Analysis of Variance (ANOVA), dengan dasar pengambilan keputusan.

1. Jika nilai sig. $> 0,05$, maka H_a ditolak dan H_o diterima
2. Jika nilai sig. $< 0,05$, maka H_a diterima dan H_o ditolak

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan pengaruh ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pemerintah daerah, belanja modal, *leverage*, ukuran legislatif, dan opini badan pemeriksa keuangan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia. Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Ukuran pemerintah daerah yang diproksikan dengan total aset berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan pemerintah dengan total aset yang lebih besar seharusnya memiliki kinerja lebih tinggi, karena dengan terdapatnya jumlah aset yang besar maka sarana dan prasarana yang tersedia dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat semakin banyak, sesuai dengan tujuan utama organisasi sektor publik (pemerintah daerah) yaitu pemberian pelayanan publik (*public service*), seperti: pendidikan, kesehatan masyarakat, keamanan, penegakan hukum, transportasi publik, dan penyediaan barang kebutuhan publik.
2. Tingkat kekayaan pemerintah daerah yang diproksikan dengan perbandingan total pendapatan asli daerah dengan total pendapatan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia. Dari sudut pandang teori keagenan, pemerintah daerah yang memiliki jumlah PAD yang besar menunjukkan keberhasilannya dalam berperan sebagai agen yang menerima kewenangan dari pemerintah pusat untuk mengelola

sumberdaya daerahnya sendiri. Selain itu keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kekayaan pemerintah daerahnya melalui PAD menunjukkan kecil ketergantungannya terhadap pihak eksternal yang dimana ini menggambarkan semakin baiknya kemampuan suatu daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahannya sehingga akan berdampak pada maksimalisasi pelayanan publik dan berefek kepada semakin baiknya kinerja suatu pemerintah daerah tersebut.

3. Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat yang diproksikan dengan perbandingan total dana alokasi umum dengan total pendapatan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan pemerintah daerah dengan total DAU yang lebih besar akan mendapatkan pengawasan yang lebih dari pemerintah pusat atau dengan kata lain pemerintah pusat akan lebih memantau pelaksanaan dari alokasi DAU dibanding dengan daerah yang lebih sedikit penerimaannya. Hal ini tentunya akan memotivasi pemerintah daerah untuk berkinerja lebih baik karena pengawasan dari pemerintah pusat lebih besar.
4. Belanja modal yang diproksikan dengan perbandingan total belanja modal dengan total belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan pemerintah daerah dengan total belanja modal yang lebih besar seharusnya memiliki kinerja lebih tinggi, karena dengan adanya belanja modal, maka pelaksanaan kinerja terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat semakin maksimal, seperti diketahui pemenuhan layanan dasar sarana dan prasarana infrastruktur sangat penting bagi pemerintah daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bagi pemerintah daerah pemenuhan layanan dasar sarana dan prasarana infrastruktur

diwujudkan melalui belanja modal yang kemudian dicatat sebagai aset pemerintah daerah.

5. *Leverage* yang diproksikan dengan rasio *debt to equity* atau perbandingan total hutang dengan total ekuitas tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan tingkat *leverage* pada pemerintah daerah di Indonesia memiliki kontribusi sangat kecil sehingga tidak memberikan pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini terjadi karena pemerintah daerah memiliki dana yang kuat untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya tanpa bergantung pada pinjaman atau hutang dari pihak eksternal, hal ini dapat dilihat dari rata-rata nilai *leverage* yang hanya sebesar hanya sebesar 1%. Kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan operasionalnya ini tidak terlepas dari pemberian dana perimbangan oleh pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah. Persentase dari dana perimbangan untuk tahun 2018 mencapai 60,9% terhadap total pendapatan daerah, selain itu dana perimbangan ini bagi pemerintah daerah tidak dihitung sebagai hutang, dan hal ini juga yang menyebabkan *leverage* suatu daerah rendah.
6. Ukuran legislatif yang diproksikan dengan jumlah anggota DPRD berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan pemerintah daerah yang memiliki jumlah anggota DPRD yang lebih banyak seharusnya memiliki kinerja lebih tinggi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya DPRD merupakan lembaga yang dibentuk baik di daerah provinsi maupun di daerah kabupaten/kota untuk menjalankan kekuasaan legislatif, yang salah satu fungsinya adalah melakukan pengawasan. DPRD melakukan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan pelaksanaan APBD sehingga dapat

dipergunakan dengan baik untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu semakin besar ukuran legislatif suatu daerah yang ditunjukkan dengan semakin banyaknya anggota DPRD seharusnya mendorong pemerintah daerah tersebut berkinerja lebih baik karena mendapatkan pengawasan yang lebih dibanding dengan pemerintah daerah yang memiliki anggota DPRD yang lebih sedikit.

7. Opini badan pemeriksa keuangan yang diproksikan dengan tingkat opini yang diberikan BPK berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan pemerintah daerah yang mendapatkan opini yang lebih baik, seharusnya memiliki kinerja lebih tinggi, karena dengan semakin baiknya opini suatu pemerintah daerah, maka hal ini menunjukkan semakin kecil permasalahan keuangan, dan semakin baik akuntabilitas dari sebuah pemerintahan daerah, atau dengan kata lain semakin baiknya kinerja dari pemerintah daerah tersebut.
8. Karakteristik pemerintah daerah yang diproksikan dengan ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja modal, *leverage*, dan ukuran legislatif, serta hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan yang diproksikan dengan opini BPK secara simultan berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal tersebut menunjukkan tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sangat bergantung kepada karakteristik dari masing-masing setiap daerah dan hasil yang diperoleh dari pemeriksaan badan pemeriksa keuangan terhadap laporan keuangan masing-masing pemerintah daerah. Hal tersebut sesuai dengan sumber informasi EKPPD yang digunakan dalam menilai tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

yang menggunakan LPPD dan pertanggung jawaban atas pengelolaan keuangan yang sekaligus merupakan bagian dari IKK.

5.2. Keterbatasan

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil dari penelitian. Adapun keterbatasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Penelitian ini hanya menggunakan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah untuk laporan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2017. Hal tersebut karena evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah untuk laporan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2018 belum diterbitkan.
2. Variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja modal, *leverage*, ukuran legislatif dan opini badan pemeriksa keuangan hanya bisa menjelaskan 36,8% variabel dependen. Dengan demikian 63,2% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar variabel independen dalam penelitian ini.
3. Variabel ukuran legislatif dalam penelitian ini hanya menggunakan jumlah anggota DPRD sebagai indikator dalam mengukur ukuran legislatif.
4. Variabel ukuran pemerintah daerah dalam penelitian ini hanya menggunakan total aset dalam mengukur ukuran pemerintah daerah.
5. Untuk hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan penelitian ini hanya menggunakan variabel opini badan pemeriksa keuangan untuk menjelaskan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan.

5.3. Saran

Penelitian ini masih membutuhkan beberapa item perbaikan untuk dilakukan pada penelitian-penelitian selanjutnya yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian yang sejenis sehingga dapat menjadikan penelitian ini lebih baik. Dari beberapa keterbatasan yang dikemukakan sebelumnya, berikut beberapa saran yang diajukan untuk penelitian selanjutnya.

1. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data EKPPD yang lebih baru untuk menggambarkan kondisi terkini, serta menggunakan lebih dari satu tahun pengamatan karena EKPPD ini dilakukan secara rutin setiap tahunnya oleh Kementerian Dalam Negeri.
2. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan variabel lain yang termasuk dalam IKK dan menjadi komponen dalam penilaian EKPPD seperti tingkat kepuasan masyarakat, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN), jumlah penduduk, luas daerah, jumlah kasus korupsi atau tingkat ketaatan pada perundang-undangan, tingkat capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), tingkat ketentraman dan ketertiban umum dan lain – lain.
3. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan indikator dalam mengukur ukuran legislatif, seperti pengalaman kerja, latar belakang pendidikan, dan lain-lain.
4. Penelitian selanjutnya lebih baik mencoba untuk menggunakan total aset yang berhubungan langsung terhadap pelayanan masyarakat atau bisa jumlah fasilitas umum yang dimiliki suatu daerah dalam mengukur ukuran pemerintah daerah.
5. Penelitian selanjutnya disaran menambahkan indikator dalam mengukur hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan, seperti jumlah tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK, dan jumlah temuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, Nur Lim, Nunuy Nur Afiah, dan Arie Pratama. 2019. Pengaruh Size, Wealth, Intergovernmental Revenue, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Sikap*, Vol. 3, No. 2, (hlm. 147-165).
- Andirfa, Mulia, Hasan Basri, dan M. Shabri A. Majid. 2016. Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan Pendapatan Asli Daerah, terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol. 5, No. 3, (hlm. 30-38).
- Andvig, Jens Chr, Odd Helge Fjeldstad, Inge Amundsen, Tone Sissener, and Tina Soreide. 2001. *Corruption A Review of Contemporary Research. Journal*. Norway: Chr. Michelsen Institute Development Studies and Human Rights
- Ara, Samuel Christian. 2016. Pengaruh Karakteristik Pemda dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemda Kabupaten di Pulau Sumba. *Jurnal JAFFA*, Vol. 4, No. 1, (hlm 1-17)
- Arifah, Dista Amalia. 2012. Praktek Teori Agensi pada Entitas Publik dan Non Publik. *Jurnal Prestasi*, Vol. 9, No. 1, (hlm. 85-95).
- Asnidar dan Novia Sintia Hardi. 2019. Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomika*, Vol. 3, No. 1, (hlm. 9-18).
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2018. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2018*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2018. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2018*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Bastian, Indra dan Gatot Soepriyanto. 2003. *Sistem Akuntansi Sektor Publik (Konsep untuk Pemerintah Daerah)*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Budiarjo, Miriam, 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Busroh, Abu Daud. 2010. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Daft, Richard L. 2009. *Organization Theory and Design*. Tenth Edition. Canada: South Western, Cengage Learning.
- Darmanto, Habib Chandra. *Pengaruh Population Employment, Size, dan Leverage, terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2018 *Ringkasan APBD 2018*. Jakarta: Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah.
- Executive Board of the United Nations Development Programme and of the United Nations Population Fund. 2008. *The UNDP Accountability System (Accountability Framework and Oversight Policy)*. New York: United Development Programme.
- Eisenhardt, Kathleen M. 1989. Agency Theory: An Assessment and Review. *The Academy of Management Review*, Vol. 14, No. 1, (Hlm. 57-74). New York: Academy of Management Review.
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. 2012. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Makassar.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haliah, Natsir, dan Mualimini. 2017. *Personal Faktor, Sistem / Administratif faktor dan Politik Faktor terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah (Kajian dalam Rangka Pengembangan Model tata Kelola yang Baik)*. Makassar : Universitas Hasanuddin Makassar.
- Halim, Abdul, dan Syukriy Abdullah. 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah (Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi). *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, Vol. 2, No. 1, (hlm. 53-54).
- Harumiati, Yayuk, dan Payamta. 2014. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2011. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, Vol. 3, No. 2, (hlm. 75-87).
- Hanafi, Mahduh dan Abdul Halim. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: (UPP) STIM YKPN.
- Hutapea, Febrina Lastiar dan Arisanti Widyaningsih. 2017. Pengaruh Good Government Governance dan Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah di Provinsi Indonesia). *Jurnal Akuntansi Riset*, Vol. 9, No. 1, (hlm. 173-186).
- Jensen, M.C and W.H Meckling. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3, (hlm.305-360). Amsterdam: North-Holland Publishing Company.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 118-8840 Tahun 2018 *tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2017*. 2018. Jakarta: Menteri Dalam Negeri.

- Khasanah, Nur Lailatul dan Shiddiq Nur Rahardjo. 2014. Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas, dan Temuan Audit terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Kusumawardani, Media. 2012. *Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Jurnal. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Lupia, Arthur and Mathew D. McCubbins. 2000. Representation or Abdication? How Citizens Use Institutions to Help Delegation Succeed. *European Journal of Politic Research* 37 (Hlm. 291-307). Dordrecht: Kluwer Academic Publisher.
- Mardianis dan H. Afrizal Enggar D.P Arum. 2017. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Daerah, dan Opini Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi*. Jurnal. Jambi: Universitas Jambi.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Marfiana, Nandhya dan Lulus Kurniasih. 2013. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*. Jurnal. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Masdiantini, Putu Riesty dan Ni Made Adi Era Wati. 2016. *Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, Intergovernmental Revenue, Temuan dan Opini Audit BPK pada Kinerja Keuangan*. Jurnal. Denpasar: Universitas Udayana.
- Mustikarini, Widya Astuti dan Debby Fitriasari. 2012. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun Anggaran 2007*. Jurnal. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Neumann, John Von and Oskar Morgenstern. 1953. *Theory of Games and Economic Behavior*. Third Edition. New Jersey: Princeton University Press.
- Noviyanti, Nur Ade dan Kiswanto. 2016. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Nugroho, Fajar. 2012. *Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di Provinsi Jawa Tengah)*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Panggalih, Dias. 2016. *Pengaruh Rasio DAU, Rasio Belanja Modal, Opini Audit, dan Rasio Temuan Audit terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Provinsi di Indonesia)*. Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

- Patrick, Patricia A. 2007. *The Determinants of Organizational Innovativeness: The Adoption of GASB 34 In Pennsylvania Local Government*. Thesis. Pennsylvania: The Pennsylvania State University.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. 2009. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. 2019. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. 2019. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat*. 2007. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. 2008. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Perwitasari, Citra. 2010. *The Influence of Financial Performance to the Level of Accountability Disclosure of Indonesia's Local Government*. Tesis. Surakarta: Universitas Sebelas Maret
- Prabowo, Tri Jatmiko Wahyu, dan Rizal Qowi. 2017. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Pemeriksaan BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2012*. Jurnal. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Pratiwi, Tri Yuni. 2018. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal, terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Yogyakarta.
- Ramdhani, Rani. 2013. *Pengaruh Return On Assets dan Debt to Equity Ratio terhadap Harga Saham Pada Institusi Finansial di Bursa Efek Indonesia*. *Journal The Winner*, Vol. 14, No. 1, (hlm. 29-41).
- Sekaran, Uma dan Bougie, Roger. 2016. *Research Methods for Business Seventh Edition*. Chichester: John Wiley & Sons, Ltd.

- Subdirektorat Statistik Keuangan. 2018. *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Sumatera dan Jawa 2016-2017*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Subdirektorat Statistik Keuangan. 2018. *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua 2016-2017*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Sudarmadji, Ardi Murdoko, dan Lana Sularto. 2007. *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Tipe Kepemilikan Perusahaan terhadap Luas Voluntary Disclosure Laporan Keuangan Tahunan*. Jurnal. Semarang. Depok: Gunadarma.
- Sudarsana, Hafidh Susila dan Shiddiq Nur Rahardjo. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia)*. Jurnal. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Sugiyono. 2016. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Suhardjanto, Djoko dan Rena Rukmita Yulianingtyas. 2011. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia)*. Jurnal. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Sumarjo, Hendro. 2010. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia)*. Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*. 2004. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*. 2014. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. 2003. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. 2014. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah*. 1999. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. 1999. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 2014. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 2004. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 2004. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Utomo, Kharis Prasetyo. 2015. *Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerinta Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2012)*. Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Yani, Fittur. 2013. *Pengaruh APBD berbasis Kinerja dan Pengawasan DPRD terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada Instansi Pemerintah Daerah di Kota Padang)*. Skripsi. Padang: Universitas Negeri Padang.

LAMPIRAN

Lampiran 1

BIODATA

Identitas Diri

Nama : Ahmad Dzakwan
Tempat, Tanggal lahir : Pare-pare, 24 April 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Mapala, Kompleks Pemda Blok E 22. No. 37
No. Telepon : 081341468855
E-Mail : ahmaddzkwn@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD Pertiwi Makassar (Tahun 2003-2009)
 - b. SMPN 2 Pangkal Pinang (Tahun 2009-2012)
 - c. SMAN 1 MAKASSAR (Tahun 2012-2015)
 - d. S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar (Tahun 2015-2019)
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Pelatihan *Basic Character Study Skill* Universitas Hasanuddin (2015)
 - b. Latihan Kepimpinan Tingkat Pertama (LK 1) Ikatan Mahasiswa Akuntansi FEB UH (2015)
 - c. Basic Training Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Ekonomi Universitas Hasanuddin (2015)

Riwayat Organisasi

1. Anggota Departemen Kajian Strategis dan Advokasi Senat Mahasiswa FEB UH (2017-2018)
2. Anggota Departemen Penelitian Pengembangan dan Pembinaan Anggota Himpunan Mahasiswa Islam Ekonomi Universitas Hasanuddin (2018-2019)

Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya.

Makassar, 29 Januari 2020

Ahmad Dzakwan

Lampiran 2

Daftar Kriteria Pemerintah Daerah Indonesia yang Menjadi Sampel Penelitian

No	Nama Pemerintah Daerah	Kriteria Penentuan Sampel					Keterangan
		EKPPD	Realisasi APBD	Neraca	Opini	DPRD	
1	Kab. Aceh Barat	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
2	Kab. Aceh Barat Daya	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
3	Kab. Aceh Besar	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
4	Kab. Aceh Jaya	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
5	Kab. Aceh Selatan	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
6	Kab. Aceh Singkil	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuh Kriteria
7	Kab. Aceh Tamiang	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
8	Kab. Aceh Tengah	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
9	Kab. Aceh Tenggara	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
10	Kab. Aceh Timur	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
11	Kab. Aceh Utara	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
12	Kab. Agam	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
13	Kab. Alor	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
14	Kab. Asahan	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
15	Kab. Asmat	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
16	Kab. Badung	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
17	Kab. Balangan	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
18	Kab. Bandung	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuh Kriteria
19	Kab. Bandung Barat	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria

20	Kab. Banggai	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
21	Kab. Banggai Kepulauan	✓	✓	✓	✓	✓	Data Outlier
22	Kab. Banggai Laut	x	✓	✓	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
23	Kab. Bangka	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
24	Kab. Bangka Barat	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
25	Kab. Bangka Selatan	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
26	Kab. Bangka Tengah	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
27	Kab. Bangkalan	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
28	Kab. Bangli	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
29	Kab. Banjar	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
30	Kab. Banjarnegara	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
31	Kab. Bantaeng	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
32	Kab. Bantul	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
33	Kab. Banyuasin	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
34	Kab. Banyumas	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
35	Kab. Banyuwangi	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
36	Kab. Barito Kuala	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
37	Kab. Barito Selatan	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
38	Kab. Barito Timur	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
39	Kab. Barito Utara	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
40	Kab. Barru	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
41	Kab. Batang	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
42	Kab. Batanghari	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
43	Kab. Batubara	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
44	Kab. Bekasi	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria

45	Kab. Belitung	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
46	Kab. Belitung Timur	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
47	Kab. Belu	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
48	Kab. Bener Meriah	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
49	Kab. Bengkulu	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
50	Kab. Bengkulu	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
51	Kab. Bengkulu Selatan	✓	✓	✓	✓	✓	Data Outlier
52	Kab. Bengkulu Tengah	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
53	Kab. Bengkulu Utara	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
54	Kab. Berau	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
55	Kab. Biak Numfor	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
56	Kab. Bima	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
57	Kab. Bintan	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
58	Kab. Bireun	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
59	Kab. Blitar	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
60	Kab. Blora	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
61	Kab. Boalemo	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
62	Kab. Bogor	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
63	Kab. Bojonegoro	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
64	Kab. Bolaang Mongondow	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
65	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
66	Kab. Bolaang Mongondow Timur	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
67	Kab. Bolaang Mongondow Utara	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
68	Kab. Bombana	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
69	Kab. Bondowoso	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria

70	Kab. Bone	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
71	Kab. Bone Bolango	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
72	Kab. Boven Digoel	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuh Kriteria
73	Kab. Boyolali	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
74	Kab. Brebes	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
75	Kab. Buleleng	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
76	Kab. Bulukumba	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
77	Kab. Bulungan	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
78	Kab. Bungo	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
79	Kab. Buol	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
80	Kab. Buru	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuh Kriteria
81	Kab. Buru Selatan	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
82	Kab. Buton	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuh Kriteria
83	Kab. Buton Selatan	x	✓	✓	✓	x	Tidak Memenuh Kriteria
84	Kab. Buton Tengah	x	✓	✓	✓	x	Tidak Memenuh Kriteria
85	Kab. Buton Utara	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuh Kriteria
86	Kab. Ciamis	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
87	Kab. Cianjur	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
88	Kab. Cilacap	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuh Kriteria
89	Kab. Cirebon	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
90	Kab. Dairi	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuh Kriteria
91	Kab. Deiyai	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuh Kriteria
92	Kab. Deli Serdang	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
93	Kab. Demak	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
94	Kab. Dharmasraya	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria

95	Kab. Dogiyai	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
96	Kab. Dompu	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
97	Kab. Donggala	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
98	Kab. Empat Lawang	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
99	Kab. Ende	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
100	Kab. Enrekang	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
101	Kab. Fakfak	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
102	Kab. Flores Timur	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
103	Kab. Garut	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
104	Kab. Gayo Lues	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
105	Kab. Gianyar	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
106	Kab. Gorontalo	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
107	Kab. Gorontalo Utara	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
108	Kab. Gowa	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
109	Kab. Gresik	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
110	Kab. Grobogan	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
111	Kab. Gunung Kidul	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
112	Kab. Gunung Mas	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
113	Kab. Halmahera Barat	x	✓	✓	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
114	Kab. Halmahera Selatan	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
115	Kab. Halmahera Tengah	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
116	Kab. Halmahera Timur	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
117	Kab. Halmahera Utara	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
118	Kab. Hulu Sungai Selatan	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria

119	Kab. Hulu Sungai Tengah	✓	✓	✓	✓	✓	Data Outlier
120	Kab. Hulu Sungai Utara	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
121	Kab. Humbang Hasundutan	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
122	Kab. Indragiri Hilir	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
123	Kab. Indragiri Hulu	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
124	Kab. Indramayu	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
125	Kab. Intan Jaya	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
126	Kab. Jayapura	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
127	Kab. Jayawijaya	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
128	Kab. Jember	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
129	Kab. Jembrana	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
130	Kab. Jeneponto	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
131	Kab. Jepara	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
132	Kab. Jombang	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
133	Kab. Kaimana	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
134	Kab. Kampar	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
135	Kab. Kapuas	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
136	Kab. Kapuas Hulu	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
137	Kab. Karanganyar	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
138	Kab. Karangasem	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
139	Kab. Karawang	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
140	Kab. Karimun	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
141	Kab. Karo	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
142	Kab. Katingan	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
143	Kab. Kaur	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria

144	Kab. Kayong Utara	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
145	Kab. Kebumen	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
146	Kab. Kediri	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
147	Kab. Keerom	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuh Kriteria
148	Kab. Kendal	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
149	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
150	Kab. Kepahiang	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
151	Kab. Kepulauan Anambas	✓	✓	✓	✓	✓	Data Outlier
152	Kab. Kepulauan Aru	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
153	Kab. Kepulauan Mentawai	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
154	Kab. Kepulauan Meranti	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
155	Kab. Kepulauan Sangihe	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
156	Kab. Kepulauan Selayar	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
157	Kab. Kepulauan Sula	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
158	Kab. Kepulauan Talaud	✓	✓	✓	✓	✓	Data Outlier
159	Kab. Kepulauan Yapen	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuh Kriteria
160	Kab. Kerinci	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuh Kriteria
161	Kab. Ketapang	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
162	Kab. Klaten	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
163	Kab. Klungkung	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
164	Kab. Kolaka	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
165	Kab. Kolaka Timur	x	✓	✓	✓	x	Tidak Memenuh Kriteria
166	Kab. Kolaka Utara	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
167	Kab. Konawe	x	✓	✓	✓	x	Tidak Memenuh Kriteria
168	Kab. Konawe Kepulauan	x	✓	x	✓	x	Tidak Memenuh Kriteria

169	Kab. Konawe Selatan	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
170	Kab. Konawe Utara	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
171	Kab. Kotabaru	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
172	Kab. Kotawaringin Barat	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
173	Kab. Kotawaringin Timur	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
174	Kab. Kuantan Singingi	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
175	Kab. Kubu Raya	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
176	Kab. Kudus	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
177	Kab. Kulon Progo	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
178	Kab. Kuningan	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
179	Kab. Kupang	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
180	Kab. Kutai Barat	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
181	Kab. Kutai Kartanegara	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
182	Kab. Kutai Timur	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
183	Kab. Labuhanbatu	✓	✓	✓	✓	✓	Data Outlier
184	Kab. Labuhanbatu Selatan	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
185	Kab. Labuhanbatu Utara	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
186	Kab. Lahat	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
187	Kab. Lamandau	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
188	Kab. Lamongan	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
189	Kab. Lampung Barat	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
190	Kab. Lampung Selatan	✓	✓	✓	✓	✓	Data Outlier
191	Kab. Lampung Tengah	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
192	Kab. Lampung Timur	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
193	Kab. Lampung Utara	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria

194	Kab. Landak	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
195	Kab. Langkat	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
196	Kab. Lanny Jaya	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuh Kriteria
197	Kab. Lebak	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuh Kriteria
198	Kab. Lebong	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuh Kriteria
199	Kab. Lembata	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuh Kriteria
200	Kab. Limapuluh Kota	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
201	Kab. Lingga	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
202	Kab. Lombok Barat	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuh Kriteria
203	Kab. Lombok Tengah	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
204	Kab. Lombok Timur	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
205	Kab. Lombok Utara	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuh Kriteria
206	Kab. Lumajang	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuh Kriteria
207	Kab. Luwu	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
208	Kab. Luwu Timur	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuh Kriteria
209	Kab. Luwu Utara	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
210	Kab. Madiun	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
211	Kab. Magelang	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
212	Kab. Magetan	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
213	Kab. Mahakam Ulu	x	✓	✓	✓	x	Tidak Memenuh Kriteria
214	Kab. Majalengka	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuh Kriteria
215	Kab. Majene	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
216	Kab. Malaka	x	✓	✓	✓	x	Tidak Memenuh Kriteria
217	Kab. Malang	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
218	Kab. Malinau	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria

219	Kab. Maluku Barat Daya	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
220	Kab. Maluku Tengah	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
221	Kab. Maluku Tenggara	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
222	Kab. Maluku Tenggara Barat	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
223	Kab. Mamasa	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
224	Kab. Mamberamo Raya	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
225	Kab. Mamberamo Tengah	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
226	Kab. Mamuju	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
227	Kab. Mamuju Tengah	x	✓	✓	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
228	Kab. Mamuju Utara	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
229	Kab. Mandailing Natal	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
230	Kab. Manggarai	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
231	Kab. Manggarai Barat	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
232	Kab. Manggarai Timur	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
233	Kab. Manokwari	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
234	Kab. Manokwari Selatan	x	✓	✓	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
235	Kab. Mappi	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
236	Kab. Maros	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
237	Kab. Maybrat	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
238	Kab. Melawi	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
239	Kab. Merangin	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
240	Kab. Merauke	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
241	Kab. Mesuji	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
242	Kab. Mimika	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria

243	Kab. Minahasa	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
244	Kab. Minahasa Selatan	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
245	Kab. Minahasa Tenggara	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
246	Kab. Minahasa Utara	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
247	Kab. Mojokerto	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
248	Kab. Morowali	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
249	Kab. Morowali Utara	x	✓	✓	✓	x	Tidak Memenuh Kriteria
250	Kab. Muara Enim	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuh Kriteria
251	Kab. Muaro Jambi	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
252	Kab. Mukomuko	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
253	Kab. Muna	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuh Kriteria
254	Kab. Muna Barat	x	✓	✓	✓	x	Tidak Memenuh Kriteria
255	Kab. Murung Raya	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
256	Kab. Musi Banyuasin	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuh Kriteria
257	Kab. Musi Rawas	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuh Kriteria
258	Kab. Musi Rawas Utara	x	✓	✓	✓	x	Tidak Memenuh Kriteria
259	Kab. Nabire	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuh Kriteria
260	Kab. Nagan Raya	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
261	Kab. Nagekeo	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
262	Kab. Natuna	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuh Kriteria
263	Kab. Nduga	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuh Kriteria
264	Kab. Ngada	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuh Kriteria
265	Kab. Nganjuk	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
266	Kab. Ngawi	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria

267	Kab. Nias	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
268	Kab. Nias Barat	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
269	Kab. Nias Selatan	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
270	Kab. Nias Utara	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
271	Kab. Nunukan	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
272	Kab. Ogan Ilir	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
273	Kab. Ogan Komering Ilir	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
274	Kab. Ogan Komering Ulu	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
275	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
276	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
277	Kab. Pacitan	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
278	Kab. Padang Lawas	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
279	Kab. Padang Lawas Utara	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
280	Kab. Padang Pariaman	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
281	Kab. Pakpak Bharat	✓	✓	✓	✓	✓	Data Outlier
282	Kab. Pamekasan	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
283	Kab. Pandeglang	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
284	Kab. Pangandaran	x	✓	✓	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
285	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
286	Kab. Paniai	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
287	Kab. Parigi Moutong	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
288	Kab. Pasaman	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
289	Kab. Pasaman Barat	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
290	Kab. Paser	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria

291	Kab. Pasuruan	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuh Kriteria
292	Kab. Pati	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
293	Kab. Pegunungan Arfak	x	✓	✓	✓	x	Tidak Memenuh Kriteria
294	Kab. Pegunungan Bintang	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuh Kriteria
295	Kab. Pekalongan	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
296	Kab. Pelalawan	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
297	Kab. Pematang	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
298	Kab. Penajam Paser Utara	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuh Kriteria
299	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	x	✓	✓	✓	x	Tidak Memenuh Kriteria
300	Kab. Pesawaran	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
301	Kab. Pesisir Barat	x	✓	✓	✓	x	Tidak Memenuh Kriteria
302	Kab. Pesisir Selatan	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuh Kriteria
303	Kab. Pidie	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
304	Kab. Pidie Jaya	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
305	Kab. Pinrang	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
306	Kab. Pohuwato	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuh Kriteria
307	Kab. Polewali Mandar	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
308	Kab. Ponorogo	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
309	Kab. Pontianak	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
310	Kab. Poso	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
311	Kab. Pringsewu	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
312	Kab. Probolinggo	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuh Kriteria
313	Kab. Pulang Pisau	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuh Kriteria
314	Kab. Pulau Morotai	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuh Kriteria

315	Kab. Pulau Taliabu	X	✓	✓	✓	X	Tidak Memenuhi Kriteria
316	Kab. Puncak	✓	✓	X	✓	X	Tidak Memenuhi Kriteria
317	Kab. Puncak Jaya	✓	✓	X	✓	X	Tidak Memenuhi Kriteria
318	Kab. Purbalingga	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
319	Kab. Purwakarta	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
320	Kab. Purworejo	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
321	Kab. Raja Ampat	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
322	Kab. Rejang Lebong	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
323	Kab. Rembang	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
324	Kab. Rokan Hilir	✓	✓	X	✓	X	Tidak Memenuhi Kriteria
325	Kab. Rokan Hulu	✓	✓	X	✓	X	Tidak Memenuhi Kriteria
326	Kab. Rote Ndao	✓	✓	X	✓	X	Tidak Memenuhi Kriteria
327	Kab. Sabu Raijua	✓	✓	X	✓	X	Tidak Memenuhi Kriteria
328	Kab. Sambas	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
329	Kab. Samosir	✓	✓	✓	✓	✓	Data Outlier
330	Kab. Sampang	✓	✓	X	✓	X	Tidak Memenuhi Kriteria
331	Kab. Sanggau	✓	✓	X	✓	X	Tidak Memenuhi Kriteria
332	Kab. Sarmi	✓	✓	X	✓	X	Tidak Memenuhi Kriteria
333	Kab. Sarolangun	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
334	Kab. Sekadau	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
335	Kab. Seluma	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
336	Kab. Semarang	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
337	Kab. Seram Bagian Barat	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
338	Kab. Seram Bagian Timur	✓	✓	X	✓	X	Tidak Memenuhi Kriteria
339	Kab. Serang	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria

340	Kab. Serdang Bedagai	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
341	Kab. Seruyan	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
342	Kab. Siak	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
343	Kab. Sidenreng Rappang	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
344	Kab. Sidoarjo	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
345	Kab. Sigi	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
346	Kab. Sijunjung	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
347	Kab. Sikka	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
348	Kab. Simalungun	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
349	Kab. Simeulue	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
350	Kab. Sinjai	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
351	Kab. Sintang	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
352	Kab. Situbondo	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
353	Kab. Sleman	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
354	Kab. Solok	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
355	Kab. Solok Selatan	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
356	Kab. Soppeng	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
357	Kab. Sorong	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
358	Kab. Sorong Selatan	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
359	Kab. Sragen	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
360	Kab. Subang	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
361	Kab. Sukabumi	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
362	Kab. Sukamara	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
363	Kab. Sukoharjo	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
364	Kab. Sumba Barat	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria

365	Kab. Sumba Barat Daya	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
366	Kab. Sumba Tengah	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
367	Kab. Sumba Timur	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
368	Kab. Sumbawa	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
369	Kab. Sumbawa Barat	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
370	Kab. Sumedang	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
371	Kab. Sumenep	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
372	Kab. Supiori	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
373	Kab. Tabalong	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
374	Kab. Tabanan	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
375	Kab. Takalar	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
376	Kab. Tambrau	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
377	Kab. Tana Tidung	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
378	Kab. Tana Toraja	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
379	Kab. Tanah Bumbu	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
380	Kab. Tanah Datar	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
381	Kab. Tanah Laut	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
382	Kab. Tangerang	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
383	Kab. Tanggamus	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
384	Kab. Tanjung Jabung Barat	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
385	Kab. Tanjung Jabung Timur	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
386	Kab. Tapanuli Selatan	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
387	Kab. Tapanuli Tengah	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
388	Kab. Tapanuli Utara	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria

389	Kab. Tapin	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
390	Kab. Tasikmalaya	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
391	Kab. Tebo	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
392	Kab. Tegal	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
393	Kab. Teluk Bintuni	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuh Kriteria
394	Kab. Teluk Wondama	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuh Kriteria
395	Kab. Temanggung	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
396	Kab. Timor Tengah Selatan	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
397	Kab. Timor Tengah Utara	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuh Kriteria
398	Kab. Toba Samosir	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
399	Kab. Tojo Una Una	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuh Kriteria
400	Kab. Tolikara	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuh Kriteria
401	Kab. Tolitoli	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuh Kriteria
402	Kab. Toraja Utara	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuh Kriteria
403	Kab. Trenggalek	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
404	Kab. Tuban	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuh Kriteria
405	Kab. Tulang Bawang	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
406	Kab. Tulang Bawang Barat	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
407	Kab. Tulungagung	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
408	Kab. Wajo	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
409	Kab. Wakatobi	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuh Kriteria
410	Kab. Waropen	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuh Kriteria
411	Kab. Way Kanan	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
412	Kab. Wonogiri	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
413	Kab. Wonosobo	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria

414	Kab. Yahukimo	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
415	Kab. Yalimo	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
416	Kota Ambon	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
417	Kota Balikpapan	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
418	Kota Banda Aceh	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
419	Kota Bandar Lampung	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
420	Kota Bandung	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
421	Kota Banjar	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
422	Kota Banjarbaru	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
423	Kota Banjarmasin	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
424	Kota Batam	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
425	Kota Batu	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
426	Kota Baubau	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
427	Kota Bekasi	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
428	Kota Bengkulu	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
429	Kota Bima	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
430	Kota Binjai	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
431	Kota Bitung	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
432	Kota Blitar	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
433	Kota Bogor	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
434	Kota Bontang	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
435	Kota Bukit Tinggi	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
436	Kota Cilegon	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
437	Kota Cimahi	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
438	Kota Cirebon	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria

439	Kota Denpasar	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
440	Kota Depok	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
441	Kota Dumai	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
442	Kota Gorontalo	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
443	Kota Gunungsitoli	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
444	Kota Jambi	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
445	Kota Jayapura	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
446	Kota Kediri	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
447	Kota Kendari	✓	✓	✓	✓	✓	Data Outlier
448	Kota Kotamobagu	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
449	Kota Kupang	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
450	Kota Langsa	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
451	Kota Lhokseumawe	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
452	Kota Lubuk Linggau	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
453	Kota Madiun	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
454	Kota Magelang	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
455	Kota Makassar	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
456	Kota Malang	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
457	Kota Manado	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
458	Kota Mataram	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
459	Kota Medan	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
460	Kota Metro	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
461	Kota Mojokerto	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
462	Kota Padang	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
463	Kota Padang Panjang	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria

464	Kota Padang Sidempuan	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
465	Kota Pagar Alam	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
466	Kota Palangkaraya	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
467	Kota Palembang	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
468	Kota Palopo	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
469	Kota Palu	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
470	Kota Pangkal Pinang	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
471	Kota Parepare	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
472	Kota Pariaman	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
473	Kota Pasuruan	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
474	Kota Payakumbuh	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
475	Kota Pekalongan	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
476	Kota Pekanbaru	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
477	Kota Pematang Siantar	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
478	Kota Pontianak	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
479	Kota Prabumulih	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
480	Kota Probolinggo	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
481	Kota Sabang	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
482	Kota Salatiga	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
483	Kota Samarinda	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
484	Kota Sawahlunto	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
485	Kota Semarang	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
486	Kota Serang	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
487	Kota Sibolga	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
488	Kota Singkawang	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria

489	Kota Solok	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
490	Kota Sorong	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
491	Kota Subulussalam	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
492	Kota Sukabumi	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
493	Kota Sungai Penuh	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
494	Kota Surabaya	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
495	Kota Surakarta	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
496	Kota Tangerang	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
497	Kota Tangerang Selatan	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
498	Kota Tanjung Balai	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
499	Kota Tanjung Pinang	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
500	Kota Tarakan	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
501	Kota Tasikmalaya	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
502	Kota Tebing Tinggi	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
503	Kota Tegal	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
504	Kota Ternate	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
505	Kota Tidore Kepulauan	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
506	Kota Tomohon	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria
507	Kota Tual	✓	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Kriteria
508	Kota Yogyakarta	✓	✓	x	✓	x	Tidak Memenuhi Kriteria

Lampiran 3

Nilai Setiap Variabel

No	Nama Pemerintah Daerah	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	Y
1	Kab. Aceh Barat	28,6069	0,1185	0,4179	0,2314	0,0103	25	5	2,5087
2	Kab. Aceh Barat Daya	28,0642	0,0937	0,4615	0,2508	0,0089	25	5	2,6944
3	Kab. Aceh Besar	28,3942	0,0706	0,3955	0,1623	0,0011	35	5	2,7305
4	Kab. Aceh Jaya	28,3477	0,0525	0,4177	0,2756	0,0015	20	5	2,7277
5	Kab. Aceh Selatan	28,4402	0,0911	0,4125	0,2513	0,0182	30	5	2,7379
6	Kab. Aceh Tamiang	28,3239	0,0915	0,4194	0,2272	0,0134	30	5	2,7314
7	Kab. Aceh Tengah	28,3597	0,1080	0,3994	0,2733	0,0138	30	5	2,6750
8	Kab. Aceh Tenggara	28,5963	0,0428	0,4161	0,2710	0,0208	25	5	2,3559
9	Kab. Aceh Timur	28,6110	0,0807	0,3961	0,2071	0,0363	40	5	2,5781
10	Kab. Aceh Utara	28,9737	0,0841	0,3485	0,1562	0,0550	45	5	2,7448
11	Kab. Agam	27,9992	0,1173	0,5906	0,1933	0,0077	45	5	2,9913
12	Kab. Alor	27,8523	0,0772	0,5606	0,2334	0,0128	30	3	2,6910
13	Kab. Asahan	28,7154	0,0831	0,5887	0,2106	0,0038	45	5	2,9141
14	Kab. Asmat	28,3848	0,0254	0,6105	0,2758	0,0212	25	5	2,5689
15	Kab. Badung	29,8211	0,8447	0,0669	0,2292	0,0066	40	5	3,2534
16	Kab. Balangan	28,2445	0,0790	0,3440	0,2611	0,0045	25	5	3,0671
17	Kab. Bandung Barat	28,5853	0,2224	0,3968	0,1550	0,0013	50	3	2,7562
18	Kab. Bangka	28,0558	0,1329	0,4907	0,2061	0,0109	35	5	3,1147
19	Kab. Bangka Barat	27,7040	0,0943	0,5246	0,1789	0,0071	25	3	3,0567
20	Kab. Bangka Selatan	27,6832	0,1088	0,5928	0,2212	0,0021	25	3	2,9701

21	Kab. Bantaeng	28,4106	0,0789	0,5503	0,2565	0,0206	25	5	3,0257
22	Kab. Bantul	28,5133	0,2368	0,4707	0,1602	0,0046	45	5	3,2641
23	Kab. Banyuasin	28,8158	0,0628	0,4604	0,1542	0,0133	45	5	2,8655
24	Kab. Banyumas	29,1537	0,1924	0,4265	0,1476	0,0086	50	5	3,1193
25	Kab. Banyuwangi	28,9335	0,1424	0,5036	0,2367	0,0643	50	5	3,3873
26	Kab. Barito Kuala	28,1565	0,0753	0,4606	0,1870	0,0218	35	5	3,0307
27	Kab. Barito Timur	27,7719	0,1231	0,5852	0,1496	0,0175	25	5	2,7719
28	Kab. Barito Utara	28,5180	0,0602	0,5203	0,3295	0,0030	25	5	2,8472
29	Kab. Batanghari	28,0650	0,0750	0,5168	0,1761	0,0012	35	5	2,5332
30	Kab. Bekasi	29,8117	0,4631	0,2309	0,2004	0,0070	50	5	2,6632
31	Kab. Belitung Timur	27,8332	0,1481	0,5870	0,1507	0,0032	25	3	2,9700
32	Kab. Bengkalis	29,7257	0,0839	0,1068	0,3047	0,0483	45	5	2,9582
33	Kab. Bengkayang	28,1278	0,0423	0,5362	0,2941	0,0378	30	3	2,7338
34	Kab. Bengkulu Tengah	27,6956	0,0324	0,5858	0,1862	0,0006	25	3	2,8641
35	Kab. Bengkulu Utara	27,9522	0,0608	0,5742	0,0741	0,0043	30	5	2,9640
36	Kab. Berau	29,5057	0,1199	0,2910	0,2733	0,0316	30	5	3,0701
37	Kab. Biak Numfor	27,8124	0,0173	0,5105	0,0443	0,3744	25	2	2,6908
38	Kab. Bima	28,3437	0,1116	0,5213	0,1753	0,0058	45	5	2,8718
39	Kab. Bintan	28,2575	0,2425	0,4243	0,1969	0,0095	25	5	3,3338
40	Kab. Bireun	28,3877	0,0915	0,3804	0,1983	0,0555	40	5	2,7340
41	Kab. Blitar	28,8766	0,1399	0,4804	0,2525	0,0036	50	5	3,1238
42	Kab. Boalemo	27,7665	0,0849	0,5358	0,2726	0,0200	25	5	2,9300
43	Kab. Bogor	30,5220	0,4361	0,2727	0,2218	0,0042	50	5	3,1174
44	Kab. Bojonegoro	28,8932	0,1505	0,3075	0,2028	0,0123	50	5	3,1241
45	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	27,5652	0,0395	0,5812	0,2770	0,0063	20	5	3,0644

46	Kab. Bolaang Mongondow Timur	27,9817	0,1178	0,4921	0,2051	0,0122	30	5	2,9559
47	Kab. Bombana	27,9372	0,0639	0,5597	0,2540	0,0134	25	5	2,9037
48	Kab. Bondowoso	28,4931	0,1190	0,4729	0,1982	0,0038	45	5	3,0614
49	Kab. Bone	29,6761	0,0274	0,5248	0,4333	0,0038	40	5	3,3445
50	Kab. Bone Bolango	27,6715	0,0990	0,5594	0,1938	0,0197	25	5	2,9248
51	Kab. Boyolali	28,3759	0,1783	0,4662	0,1956	0,0101	45	5	3,1428
52	Kab. Brebes	28,7294	0,1851	0,4610	0,2145	0,0179	50	3	2,9195
53	Kab. Buleleng	28,2788	0,2069	0,4388	0,1391	0,0068	45	5	3,0808
54	Kab. Bulukumba	28,4406	0,1404	0,4917	0,2310	0,0417	40	5	3,3291
55	Kab. Bulungan	29,0938	0,1104	0,4619	0,1455	0,0158	25	3	2,8447
56	Kab. Bungo	27,8987	0,1430	0,4965	0,1311	0,0055	35	3	2,9345
57	Kab. Buol	27,4651	0,1812	0,3618	0,1333	0,0294	25	5	2,5951
58	Kab. Buru Selatan	27,8696	0,0193	0,6198	0,3361	0,0067	20	2	2,6014
59	Kab. Ciamis	28,5694	0,0864	0,4579	0,1790	0,0290	50	5	3,0165
60	Kab. Cianjur	29,2149	0,1422	0,4099	0,2247	0,0199	50	5	2,5821
61	Kab. Cirebon	28,7739	0,2170	0,4462	0,1694	0,0156	50	5	2,6287
62	Kab. Deli Serdang	29,4193	0,2549	0,4407	0,2195	0,0108	50	3	3,0189
63	Kab. Demak	29,1414	0,1502	0,4332	0,2302	0,0037	50	5	3,1989
64	Kab. Dharmasraya	28,2914	0,1043	0,5286	0,2888	0,0127	25	5	3,1856
65	Kab. Empat Lawang	28,1525	0,0761	0,4599	0,2278	0,0004	35	5	2,8034
66	Kab. Ende	27,7781	0,0863	0,5585	0,1930	0,0042	30	3	2,7234
67	Kab. Flores Timur	27,5856	0,0695	0,5640	0,1208	0,0006	30	3	2,6869
68	Kab. Gayo Lues	28,2260	0,0618	0,4740	0,2465	0,0000	20	5	2,7431
69	Kab. Gianyar	28,1055	0,3664	0,3834	0,2129	0,0643	40	5	3,3212
70	Kab. Gorontalo Utara	27,4524	0,0616	0,5490	0,2204	0,0059	25	5	2,9713

71	Kab. Gowa	28,6830	0,1499	0,4668	0,2766	0,0011	45	5	3,2412
72	Kab. Gresik	29,1222	0,3181	0,3308	0,1598	0,0130	50	5	3,3121
73	Kab. Grobogan	28,5143	0,1815	0,4498	0,2363	0,0827	50	5	3,1075
74	Kab. Gunung Kidul	29,3791	0,1469	0,5079	0,2133	0,0050	45	5	3,0758
75	Kab. Gunung Mas	28,2581	0,0352	0,5404	0,2938	0,0068	25	5	2,5877
76	Kab. Hulu Sungai Selatan	28,4747	0,1246	0,4572	0,1962	0,0053	30	5	2,9801
77	Kab. Hulu Sungai Utara	28,2151	0,1215	0,4468	0,1690	0,0234	30	5	2,9576
78	Kab. Humbang Hasundutan	28,0612	0,1669	0,5510	0,2343	0,0187	25	5	3,0064
79	Kab. Indragiri Hulu	28,6318	0,1087	0,4291	0,1726	0,0062	40	5	2,8891
80	Kab. Indramayu	29,0046	0,1761	0,4175	0,2349	0,0198	50	5	3,1636
81	Kab. Jember	28,7815	0,2067	0,4851	0,1992	0,0119	50	5	3,0491
82	Kab. Jembrana	28,1732	0,1022	0,4656	0,2323	0,0034	35	5	3,1147
83	Kab. Jepara	29,3120	0,1525	0,4528	0,1825	0,0082	50	5	3,0391
84	Kab. Jombang	28,5978	0,2071	0,4338	0,1613	0,0084	50	5	2,5823
85	Kab. Kampar	28,2502	0,1424	0,4779	0,2077	0,0240	35	5	2,9564
86	Kab. Kapuas	28,7609	0,0543	0,5023	0,2640	0,0943	40	5	2,6579
87	Kab. Kapuas Hulu	28,6194	0,0779	0,5791	0,2201	0,0009	30	5	2,7990
88	Kab. Karanganyar	28,5350	0,2032	0,4789	0,1316	0,0036	45	5	3,3886
89	Kab. Karawang	28,9203	0,3374	0,2991	0,1797	0,0217	50	5	3,1596
90	Kab. Karimun	29,2803	0,0218	0,5367	0,4317	0,0036	30	5	3,2974
91	Kab. Karo	28,2872	0,1086	0,5081	0,2209	0,0111	35	3	2,6130
92	Kab. Katingan	28,4642	0,0456	0,5989	0,3076	0,0016	25	3	2,7585
93	Kab. Kayong Utara	27,7874	0,0164	0,4597	0,1964	0,0166	25	3	2,7107
94	Kab. Kebumen	28,9645	0,1635	0,4548	0,1649	0,0035	50	5	2,5236
95	Kab. Kediri	28,8210	0,1964	0,4489	0,2439	0,0013	50	5	3,2027

96	Kab. Kendal	28,3221	0,1978	0,4668	0,1537	0,0067	45	5	3,0932
97	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	27,7374	0,0303	0,5495	0,1753	0,0123	25	5	2,7734
98	Kab. Kepahiang	27,6824	0,0435	0,5963	0,2162	0,0026	25	3	2,6864
99	Kab. Kepulauan Aru	27,7376	0,1459	0,3998	0,1304	0,0190	30	2	2,5026
100	Kab. Kepulauan Mentawai	27,8847	0,0746	0,6443	0,3101	0,0412	20	5	2,8650
101	Kab. Kepulauan Meranti	28,5793	0,0845	0,3920	0,1793	0,0144	30	5	2,6847
102	Kab. Kepulauan Sangihe	27,8387	0,0571	0,4302	0,2568	0,0182	25	5	2,7773
103	Kab. Kepulauan Selayar	28,1655	0,0866	0,5908	0,1998	0,0047	25	5	2,8555
104	Kab. Kepulauan Sula	27,8845	0,0265	0,6202	0,2330	0,0151	25	3	2,4924
105	Kab. Ketapang	28,8796	0,0842	0,5623	0,2290	0,0239	45	5	2,9044
106	Kab. Klaten	28,7157	0,1439	0,4926	0,1470	0,0032	50	3	3,0353
107	Kab. Klungkung	29,8636	0,0394	0,5525	0,3567	0,0054	30	5	3,2143
108	Kab. Kolaka	28,0956	0,1130	0,5378	0,2367	0,0184	35	5	2,9266
109	Kab. Kolaka Utara	28,0191	0,0728	0,6130	0,1791	0,0041	35	5	2,8471
110	Kab. Konawe Utara	27,8172	0,0292	0,6117	0,2199	0,0051	20	5	2,6282
111	Kab. Kotabaru	28,5482	0,0856	0,4332	0,1778	0,0142	35	5	2,8419
112	Kab. Kuantan Singingi	28,3331	0,0799	0,4441	0,1494	0,0143	35	5	2,8150
113	Kab. Kubu Raya	28,0629	0,1486	0,5546	0,1826	0,0078	45	5	2,8812
114	Kab. Kudus	28,9169	0,1846	0,4073	0,2495	0,0067	45	5	3,1959
115	Kab. Kulon Progo	28,0376	0,1752	0,4953	0,1809	0,0097	40	5	3,1926
116	Kab. Kuningan	29,9195	0,0369	0,5675	0,4547	0,0058	40	5	3,3807
117	Kab. Kutai Barat	29,3134	0,0787	0,4526	0,2234	0,0516	25	5	2,8234
118	Kab. Kutai Kartanegara	30,3515	0,1280	0,0417	0,1540	0,0510	45	3	2,5999
119	Kab. Kutai Timur	29,7937	0,0755	0,2445	0,2639	0,1521	40	5	2,6975
120	Kab. Labuhanbatu Selatan	27,6915	0,0978	0,5805	0,3034	0,0002	35	5	2,7074

121	Kab. Labuhanbatu Utara	28,4065	0,0482	0,5382	0,2078	0,0010	35	5	2,8031
122	Kab. Lahat	28,5687	0,0932	0,3679	0,1942	0,1027	40	5	2,8902
123	Kab. Lamandau	28,0391	0,1880	0,5347	0,2607	0,0005	20	5	2,9934
124	Kab. Lamongan	28,7614	0,1579	0,4220	0,1851	0,0053	50	5	3,2631
125	Kab. Lampung Barat	28,1780	0,0768	0,4856	0,3107	0,0024	40	5	3,0269
126	Kab. Lampung Timur	28,3461	0,1027	0,5268	0,1652	0,0084	50	3	2,8069
127	Kab. Landak	28,6050	0,0966	0,5199	0,2401	0,0013	35	5	2,8518
128	Kab. Langkat	28,8930	0,0605	0,5103	0,2123	0,0024	50	3	2,7980
129	Kab. Limapuluh Kota	27,9402	0,0939	0,5862	0,1853	0,0021	35	5	2,9384
130	Kab. Lingga	28,0268	0,0297	0,5529	0,1466	0,0107	20	5	2,9630
131	Kab. Lombok Tengah	28,4174	0,1496	0,5118	0,1909	0,0062	50	5	2,9647
132	Kab. Lombok Timur	28,5324	0,1564	0,4487	0,1930	0,0161	50	5	3,0517
133	Kab. Luwu	28,2894	0,0845	0,5237	0,1723	0,0052	35	5	2,7711
134	Kab. Luwu Utara	27,7485	0,0905	0,5395	0,2308	0,0118	35	5	2,9834
135	Kab. Madiun	28,8937	0,1376	0,4993	0,2090	0,0026	45	5	3,2240
136	Kab. Magelang	28,4072	0,1777	0,4429	0,2051	0,0046	50	5	3,1128
137	Kab. Magetan	29,7943	0,0411	0,5620	0,3325	0,0009	40	5	3,1908
138	Kab. Majene	27,9962	0,0906	0,5546	0,2234	0,0207	25	5	3,0198
139	Kab. Malang	29,3777	0,1986	0,4450	0,2047	0,0058	50	5	2,8128
140	Kab. Malinau	27,7552	0,0451	0,5418	0,2176	0,0196	40	5	2,8077
141	Kab. Maluku Barat Daya	27,7511	0,0500	0,5532	0,3174	0,0077	20	3	2,6408
142	Kab. Maluku Tengah	28,0278	0,0412	0,5926	0,2240	0,0094	40	5	2,8363
143	Kab. Maluku Tenggara	27,7905	0,0553	0,3690	0,1252	0,0252	35	5	2,6259
144	Kab. Maluku Tenggara Barat	27,8614	0,0302	0,6101	0,1923	0,0270	25	3	2,4627
145	Kab. Mamuju	28,2390	0,0681	0,5717	0,2523	0,0024	40	5	2,8342

146	Kab. Mamuju Utara	28,0884	0,0611	0,5609	0,4057	0,0052	30	5	3,0477
147	Kab. Mandailing Natal	28,0624	0,0527	0,5088	0,1613	0,0001	40	3	2,3537
148	Kab. Manggarai	28,2102	0,1159	0,5126	0,2159	0,0006	35	3	2,7618
149	Kab. Manggarai Barat	28,1244	0,1216	0,4891	0,2578	0,0007	30	3	2,9197
150	Kab. Merangin	28,2466	0,0762	0,6320	0,2192	0,0089	30	5	2,9938
151	Kab. Merauke	27,1187	0,1438	0,3932	0,1284	0,0217	45	5	2,6881
152	Kab. Mimika	28,9928	0,1671	0,3397	0,2227	0,1607	35	5	2,7833
153	Kab. Minahasa	28,1551	0,0883	0,5146	0,1566	0,0075	35	5	2,8531
154	Kab. Minahasa Selatan	27,8939	0,0519	0,5343	0,2242	0,0121	30	5	2,9451
155	Kab. Minahasa Tenggara	27,8581	0,0452	0,5598	0,2606	0,0101	25	5	2,9889
156	Kab. Minahasa Utara	27,8598	0,0926	0,5185	0,1854	0,0038	30	5	2,9901
157	Kab. Mojokerto	29,2607	0,2143	0,4169	0,2479	0,0051	50	5	2,6448
158	Kab. Morowali	28,2474	0,1665	0,4427	0,3214	0,1364	30	3	2,5045
159	Kab. Muaro Jambi	28,1561	0,0642	0,5523	0,2954	0,0024	35	5	2,7541
160	Kab. Mukomuko	27,9457	0,0905	0,5498	0,3122	0,0047	25	5	2,8640
161	Kab. Murung Raya	28,5742	0,0591	0,5747	0,1959	0,0014	25	5	2,8651
162	Kab. Nagan Raya	28,1759	0,0650	0,4449	0,2948	0,0428	25	5	2,6520
163	Kab. Nagekeo	28,1284	0,0607	0,5655	0,2582	0,0030	25	3	2,7084
164	Kab. Nganjuk	28,5888	0,1446	0,4608	0,1442	0,0160	45	5	3,1215
165	Kab. Ngawi	28,8237	0,1381	0,5207	0,1831	0,0009	45	5	3,1011
166	Kab. Nias Barat	27,5176	0,0562	0,5339	0,3149	0,0514	20	2	2,5170
167	Kab. Nias Selatan	27,9302	0,0164	0,4778	0,1763	0,0656	35	2	2,3911
168	Kab. Nunukan	29,1274	0,0666	0,3453	0,2184	0,0526	25	5	2,6560
169	Kab. Ogan Ilir	28,1796	0,0426	0,4738	0,2553	0,0394	40	5	2,8794
170	Kab. Padang Lawas	27,7503	0,0454	0,5088	0,2148	0,0101	30	3	2,4580

171	Kab. Padang Lawas Utara	27,8136	0,0669	0,4827	0,2637	0,0075	30	5	2,7851
172	Kab. Padang Pariaman	27,7147	0,1018	0,5544	0,2595	0,0058	40	5	2,9927
173	Kab. Pamekasan	28,6111	0,1276	0,4447	0,2164	0,0060	45	5	2,6154
174	Kab. Pasaman	28,1040	0,1429	0,5969	0,1851	0,0131	35	5	3,0822
175	Kab. Pasaman Barat	28,1083	0,1483	0,6013	0,2355	0,0091	40	5	2,8758
176	Kab. Paser	29,3279	0,0735	0,2504	0,2698	0,0032	30	5	2,7851
177	Kab. Pati	29,3325	0,1559	0,4317	0,1696	0,0022	50	5	3,3144
178	Kab. Pekalongan	28,3553	0,1477	0,4402	0,1653	0,0100	45	5	3,1311
179	Kab. Pelalawan	28,8425	0,1242	0,4081	0,1775	0,0038	35	5	2,8552
180	Kab. Pematang	28,5123	0,1810	0,5002	0,1488	0,0072	50	5	2,9110
181	Kab. Pesawaran	28,2043	0,0742	0,5031	0,2557	0,0210	45	5	2,7933
182	Kab. Pidie	28,5184	0,1237	0,3531	0,1482	0,0161	40	5	2,6590
183	Kab. Pidie Jaya	28,0450	0,0351	0,3116	0,2409	0,0076	25	5	2,6765
184	Kab. Pinrang	28,5020	0,0973	0,5651	0,2104	0,0106	40	5	3,1852
185	Kab. Polewali Mandar	28,0627	0,1527	0,5354	0,2045	0,0156	45	5	3,1095
186	Kab. Ponorogo	28,5132	0,1389	0,4714	0,2080	0,0096	45	5	3,1672
187	Kab. Pontianak	27,7860	0,0722	0,5835	0,2187	0,0055	30	5	2,7092
188	Kab. Poso	28,2439	0,0857	0,5588	0,2053	0,0048	30	3	2,8473
189	Kab. Pringsewu	28,2314	0,0985	0,5207	0,2328	0,0140	40	5	2,8924
190	Kab. Purbalingga	28,3025	0,1817	0,4502	0,1988	0,0180	45	5	2,6286
191	Kab. Purwakarta	28,5199	0,2196	0,3952	0,2058	0,0723	45	5	3,2097
192	Kab. Purworejo	26,5392	0,1412	0,4370	0,2053	-0,0301	45	5	3,0972
193	Kab. Raja Ampat	27,5220	0,1421	0,3523	0,1419	0,0241	30	5	2,6035
194	Kab. Rejang Lebong	27,8257	0,1081	0,5679	0,1562	0,0117	30	3	2,8567
195	Kab. Rembang	27,9534	0,1828	0,4434	0,1934	0,0233	45	3	2,8848

196	Kab. Sambas	28,3573	0,1226	0,5332	0,1950	0,0422	45	3	2,8235
197	Kab. Sarolangun	28,2527	0,0723	0,4934	0,2227	0,0073	35	5	3,0452
198	Kab. Sekadau	27,8667	0,0856	0,5920	0,2915	0,0033	30	5	2,8426
199	Kab. Seluma	27,9829	0,0315	0,5680	0,1468	0,0025	30	3	2,5627
200	Kab. Semarang	28,6155	0,1955	0,4458	0,1703	0,0052	45	5	3,2338
201	Kab. Seram Bagian Barat	27,4865	0,0200	0,3625	0,1248	0,0307	30	2	2,5102
202	Kab. Serang	28,6404	0,2901	0,3810	0,1691	0,0080	45	5	3,0948
203	Kab. Serdang Bedagai	28,0998	0,0748	0,5507	0,1715	0,0027	45	3	2,8402
204	Kab. Siak	29,8734	0,0504	0,5188	0,3528	0,0037	30	5	3,1481
205	Kab. Sidenreng Rappang	28,4968	0,1117	0,4661	0,3294	0,1733	35	5	3,1544
206	Kab. Sidoarjo	30,2413	0,4132	0,2976	0,1508	0,0034	50	5	3,4108
207	Kab. Sigi	27,9698	0,0698	0,5741	0,1889	0,0169	30	5	3,0361
208	Kab. Sikka	27,8009	0,1135	0,5928	0,1748	0,0036	35	5	2,8154
209	Kab. Sinjai	28,0839	0,1057	0,5443	0,2497	0,0028	30	5	3,2070
210	Kab. Sintang	28,8767	0,0580	0,4662	0,2311	0,0051	35	5	2,9770
211	Kab. Situbondo	28,7107	0,1400	0,4984	0,2143	0,0034	45	5	2,9864
212	Kab. Sleman	28,7669	0,3157	0,3810	0,1529	0,0054	50	5	3,1863
213	Kab. Solok	27,8878	0,0990	0,6212	0,1739	0,0031	35	5	2,9953
214	Kab. Solok Selatan	28,0956	0,0949	0,6036	0,2829	0,0038	25	5	2,9455
215	Kab. Sragen	28,3668	0,1850	0,4797	0,1587	0,0060	45	5	3,2967
216	Kab. Subang	28,9258	0,2030	0,4479	0,1647	0,0058	50	3	2,6967
217	Kab. Sukamara	28,2344	0,0740	0,6244	0,3767	0,0001	20	5	2,7617
218	Kab. Sukoharjo	28,9254	0,2260	0,4410	0,1329	0,0027	45	5	3,1332
219	Kab. Sumba Barat Daya	27,7749	0,1052	0,5075	0,2454	0,0140	35	3	2,6352
220	Kab. Sumba Timur	28,2693	0,0883	0,5678	0,2565	0,0034	30	3	2,7638

221	Kab. Sumbawa	28,5752	0,1490	0,4871	0,2343	0,0001	45	5	3,1974
222	Kab. Sumbawa Barat	28,2800	0,1385	0,3260	0,3308	0,0069	25	5	2,9944
223	Kab. Sumedang	28,6367	0,2081	0,4209	0,1901	0,0478	50	5	3,1292
224	Kab. Tabalong	28,7904	0,1379	0,3776	0,2760	0,0029	30	5	3,0240
225	Kab. Tanah Laut	28,6851	0,1372	0,3876	0,3143	0,0653	35	5	2,9057
226	Kab. Tanggamus	28,2586	0,0359	0,4953	0,1608	0,0155	45	5	2,8416
227	Kab. Tanjung Jabung Barat	28,7588	0,0767	0,3936	0,3299	0,0013	35	3	2,6799
228	Kab. Tanjung Jabung Timur	28,0603	0,0710	0,4932	0,2627	0,0012	30	5	2,7907
229	Kab. Tapanuli Tengah	27,8308	0,0665	0,5689	0,1495	0,0104	35	3	2,8567
230	Kab. Tapanuli Utara	28,1624	0,1330	0,5236	0,1295	0,0026	35	5	2,7627
231	Kab. Tapin	28,1686	0,0852	0,4448	0,1840	0,0105	25	5	2,8604
232	Kab. Tasikmalaya	28,8733	0,1210	0,4346	0,1660	0,0075	50	5	3,2332
233	Kab. Tebo	28,2797	0,0674	0,5738	0,2415	0,0232	35	5	2,8783
234	Kab. Tegal	28,5652	0,1532	0,4658	0,1785	0,0116	30	5	3,0183
235	Kab. Temanggung	28,5922	0,1733	0,4460	0,1772	0,0364	45	5	3,0512
236	Kab. Timor Tengah Selatan	27,9785	0,1336	0,5253	0,1690	0,0095	40	3	2,4672
237	Kab. Toba Samosir	27,9956	0,0480	0,4622	0,1810	0,0105	30	5	2,7618
238	Kab. Trenggalek	28,2562	0,1413	0,4943	0,2004	0,0053	45	5	3,0997
239	Kab. Tulang Bawang	28,2573	0,0353	0,5168	0,2226	0,0106	45	5	2,7837
240	Kab. Tulang Bawang Barat	25,9125	0,1079	0,5089	0,3508	-0,0870	30	5	3,0820
241	Kab. Tulungagung	28,6806	0,1936	0,4434	0,1537	0,0064	50	5	2,8109
242	Kab. Wajo	28,6232	0,0950	0,4977	0,2501	0,0101	40	5	2,9545
243	Kab. Way Kanan	28,2463	0,0370	0,4855	0,2642	0,0110	40	5	2,9852
244	Kab. Wonogiri	28,6348	0,1440	0,4855	0,2173	0,0079	45	5	2,9428
245	Kab. Wonosobo	28,3552	0,1690	0,4519	0,1813	0,0013	45	5	3,0905

246	Kota Ambon	27,7849	0,1230	0,5673	0,1857	0,0050	35	5	2,8023
247	Kota Banda Aceh	29,3003	0,2171	0,4755	0,1858	0,0138	30	5	2,9673
248	Kota Bandar Lampung	28,9153	0,2944	0,4971	0,2217	0,1506	50	5	2,8870
249	Kota Bandung	30,6752	0,4497	0,2865	0,1658	0,0171	50	3	3,3019
250	Kota Banjar	27,9549	0,1545	0,4535	0,2733	0,0021	25	5	3,3032
251	Kota Batam	28,8366	0,4515	0,2699	0,2503	0,0264	50	5	3,0857
252	Kota Batu	28,0250	0,1719	0,5469	0,1830	0,0057	25	5	2,7325
253	Kota Bekasi	29,9613	0,4180	0,2548	0,2481	0,0107	50	5	3,2546
254	Kota Bima	27,7387	0,0539	0,4683	0,3065	0,0017	25	5	3,1652
255	Kota Bitung	27,9761	0,1412	0,5457	0,2454	0,0036	30	5	3,0384
256	Kota Bogor	29,5158	0,4273	0,3459	0,1930	0,0131	45	5	3,1727
257	Kota Bukit Tinggi	27,6681	0,1562	0,6905	0,1959	0,0023	25	5	3,1668
258	Kota Cilegon	28,5585	0,3816	0,3484	0,2848	0,0031	35	5	2,6284
259	Kota Cirebon	28,6703	0,3193	0,4156	0,1563	0,0143	35	5	3,1177
260	Kota Depok	29,6694	0,3775	0,3229	0,3208	0,0041	50	5	3,2858
261	Kota Dumai	28,4537	0,2240	0,3448	0,2266	0,0133	30	5	2,8702
262	Kota Gunungsitoli	27,8963	0,0431	0,6170	0,3208	0,0028	25	3	2,6833
263	Kota Jambi	28,4840	0,2648	0,4763	0,2802	0,0207	45	5	2,9893
264	Kota Jayapura	28,4428	0,1426	0,5192	0,1321	0,0051	40	5	2,9601
265	Kota Kediri	28,5587	0,2365	0,4898	0,1915	0,0061	30	5	3,2769
266	Kota Kotamobagu	27,6397	0,1013	0,5357	0,2819	0,0063	25	5	2,9865
267	Kota Langsa	27,9996	0,1184	0,4375	0,3262	0,0274	25	5	2,7856
268	Kota Lhokseumawe	27,9981	0,0699	0,5097	0,2570	0,0637	25	5	2,7246
269	Kota Lubuk Linggau	28,4140	0,1275	0,4902	0,2720	0,0372	30	5	2,7623
270	Kota Madiun	28,2141	0,2408	0,5246	0,2680	0,0044	30	5	3,3056

271	Kota Magelang	28,7880	0,2568	0,4838	0,2650	0,0005	25	5	3,2214
272	Kota Malang	29,2474	0,2983	0,4283	0,1877	0,0021	45	5	2,7942
273	Kota Manado	28,5482	0,2400	0,4343	0,2482	0,0083	40	5	2,9939
274	Kota Medan	30,9707	0,3946	0,3592	0,2269	0,0084	50	3	2,7890
275	Kota Metro	28,2009	0,1731	0,5081	0,2681	0,0161	25	5	3,2023
276	Kota Mojokerto	28,0943	0,2163	0,5183	0,1639	0,0067	25	5	2,6615
277	Kota Palangkaraya	28,5842	0,1380	0,5909	0,2187	0,0151	30	5	2,9338
278	Kota Palembang	30,0984	0,3210	0,3733	0,2728	0,0098	45	5	3,0427
279	Kota Palopo	28,1239	0,1791	0,5526	0,2994	0,0616	25	5	3,0493
280	Kota Palu	28,3527	0,2121	0,5010	0,2017	0,0323	35	5	2,9253
281	Kota Pangkal Pinang	28,4873	0,1979	0,5122	0,3075	0,0016	30	5	3,0546
282	Kota Parepare	28,2238	0,1553	0,5006	0,3178	0,0409	25	5	3,2175
283	Kota Pariaman	27,2691	0,0483	0,6498	0,2434	0,0100	20	5	2,8900
284	Kota Pasuruan	27,2144	0,1856	0,3537	0,1385	0,0211	50	5	2,6260
285	Kota Payakumbuh	27,5590	0,1578	0,5923	0,2544	0,0071	25	5	3,1338
286	Kota Pekalongan	28,3272	0,2096	0,4903	0,2388	0,0058	30	5	3,0939
287	Kota Pekanbaru	29,1133	0,3207	0,3612	0,2168	0,0421	45	5	3,3489
288	Kota Pematang Siantar	28,4809	0,0959	0,6895	0,2813	0,0309	30	5	2,7802
289	Kota Pontianak	28,3498	0,3080	0,4525	0,2944	0,0037	45	5	3,1761
290	Kota Prabumulih	28,3999	0,1331	0,4604	0,1877	0,0353	25	5	2,9633
291	Kota Probolinggo	27,8059	0,2239	0,5072	0,2498	0,0095	45	5	3,2015
292	Kota Samarinda	30,4588	0,2270	0,2856	0,3075	0,0342	45	5	3,2297
293	Kota Sawahlunto	27,2385	0,1077	0,6407	0,2110	0,0497	20	5	3,0139
294	Kota Semarang	30,9806	0,4520	0,3003	0,2946	0,0019	50	5	3,3775
295	Kota Sibolga	27,8285	0,1683	0,6585	0,2088	0,0046	20	3	2,7640

296	Kota Solok	27,6359	0,0701	0,6666	0,2523	0,0021	20	5	2,9809
297	Kota Subulussalam	27,6109	0,0756	0,4637	0,3538	0,0286	20	5	2,6809
298	Kota Sukabumi	27,9212	0,2952	0,4077	0,1871	0,0150	35	5	3,2637
299	Kota Sungai Penuh	27,6271	0,0458	0,6114	0,2522	0,0013	25	5	2,8413
300	Kota Surabaya	31,2257	0,6417	0,1512	0,3182	0,0152	50	5	3,3029
301	Kota Surakarta	29,4907	0,2924	0,4583	0,2656	0,0052	45	5	3,0992
302	Kota Tangerang	29,4528	0,5068	0,2204	0,2602	0,0008	50	5	3,3314
303	Kota Tangerang Selatan	30,5164	0,5406	0,1909	0,3395	0,0003	50	5	3,1352
304	Kota Tarakan	29,2975	0,0862	0,4457	0,2240	0,0606	25	3	2,8461
305	Kota Tasikmalaya	28,6802	0,1946	0,4277	0,2281	0,0268	45	5	3,2622
306	Kota Tebing Tinggi	27,8695	0,1591	0,5948	0,2634	0,0187	25	3	3,0020
307	Kota Tegal	28,1748	0,2994	0,4705	0,2021	0,0114	50	3	2,6052
308	Kota Ternate	28,3518	0,0993	0,6465	0,2027	0,0157	30	5	2,8011
309	Kota Tual	27,4948	0,0543	0,6594	0,3193	0,0147	20	3	2,7043

Lampiran 4

Hasil Statistik Deskriptif

1. Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
TA	309	25,91	31,23	28,4290	,69435
PAD	309	,0164	,8447	,140808	,1061844
DAU	309	,0417	,6905	,478209	,0998330
BM	309	,0443	,4547	,223319	,0600449
Lev	309	-,0870	,3744	,017071	,0322426
DPRD	309	20,00	50,00	36,0680	9,63583
OP	309	2,00	5,00	4,6181	,82363
EKPPD	309	2,3537	3,4108	2,924671	,2263365
Valid N (<i>listwise</i>)	309				

Lampiran 5

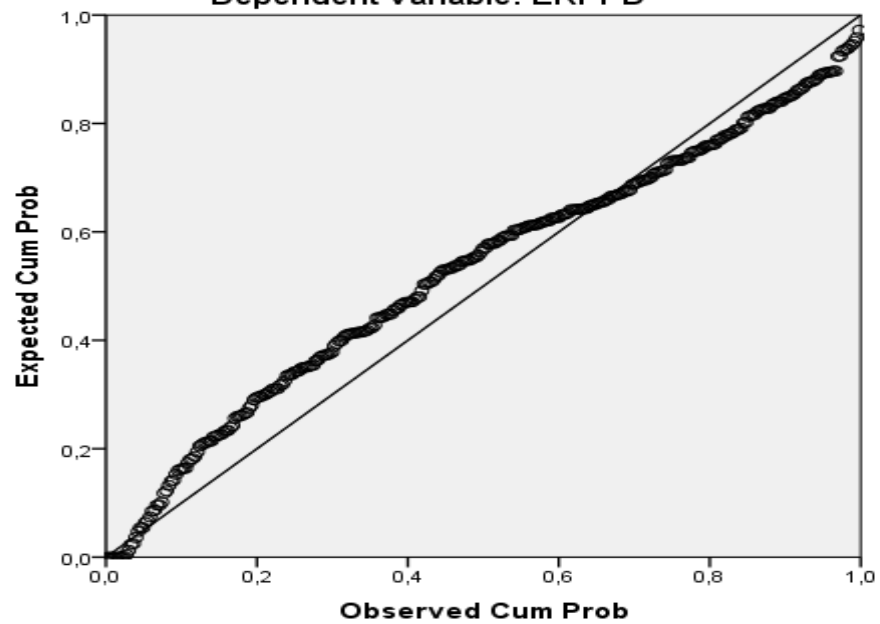
Hasil Uji Asumsi Klasik

Sebelum *Outlier* Data

1. Uji Normalitas

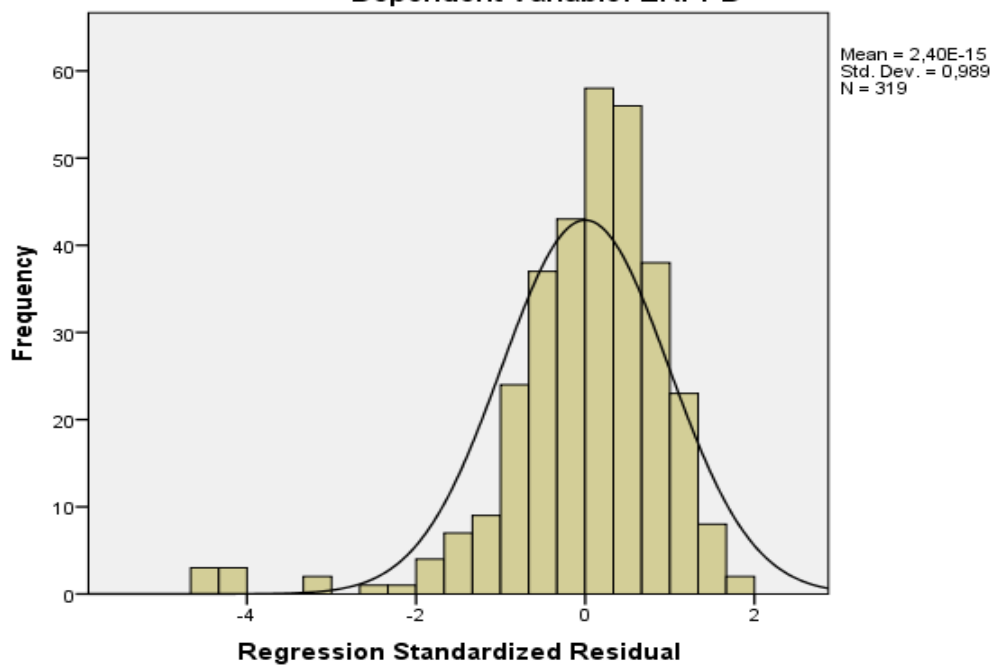
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: EKPPD



Histogram

Dependent Variable: EKPPD



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		<i>Unstandardized Residual</i>
<i>N</i>		319
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	,0000000
	<i>Std. Deviation</i>	,25481789
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	,095
	<i>Positive</i>	,069
	<i>Negative</i>	-,095
<i>Test Statistic</i>		,095
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		,000 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

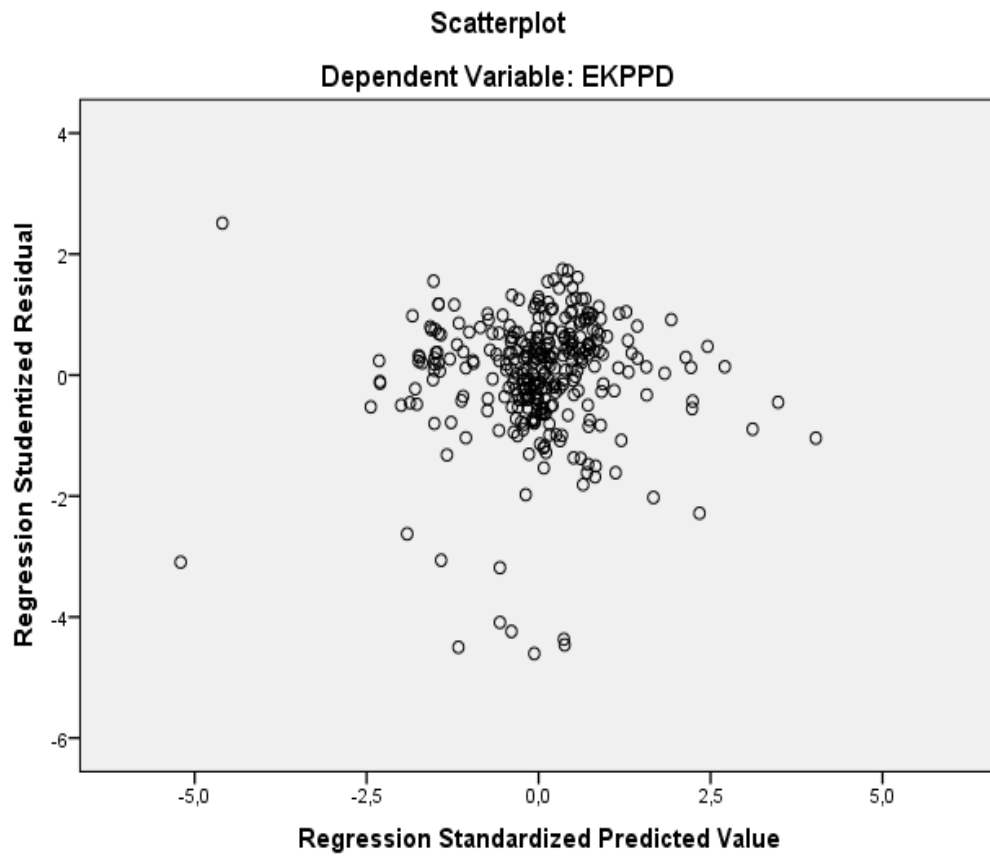
2. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

<i>Model</i>		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>Collinearity Statistics</i>	
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
1	(Constant)	2,238	,786			
	TA	,003	,029	,007	,511	1,957
	PAD	,619	,164	,237	,611	1,637
	DAU	-,250	,054	-,252	,808	1,238
	BM	,367	,272	,074	,792	1,263
	Lev	-,757	,461	-,082	,956	1,046
	DPRD	,003	,002	,111	,560	1,786
	OP	,090	,018	,252	,928	1,078

a. Dependent Variable: EKPPD

3. Uji Heteroskedastisitas



Lampiran 6

Hasil Metode Data *Outlier*1. *Box and Whisker Plot**Case Processing Summary*

	Cases					
	<i>Valid</i>		<i>Missing</i>		<i>Total</i>	
	<i>N</i>	<i>Percent</i>	<i>N</i>	<i>Percent</i>	<i>N</i>	<i>Percent</i>
EKPPD	319	100,0%	0	0,0%	319	100,0%

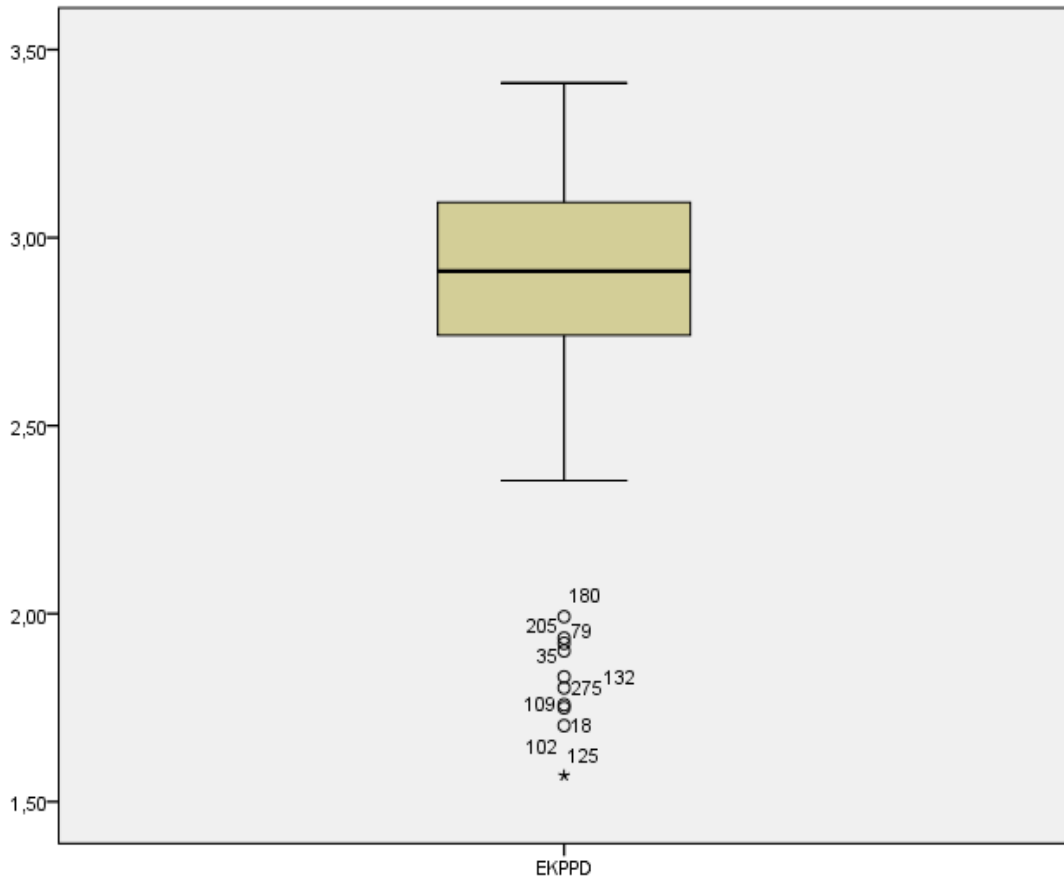
Descriptives

		<i>Statistic</i>	<i>Std. Error</i>
EKPPD	<i>Mean</i>	2,8899	,01656
	<i>95% Confidence Interval for Mean</i>		
	<i>Lower Bound</i>	2,8573	
	<i>Upper Bound</i>	2,9225	
	<i>5% Trimmed Mean</i>	2,9120	
	<i>Median</i>	2,9110	
	<i>Variance</i>	,087	
	<i>Std. Deviation</i>	,29579	
	<i>Minimum</i>	1,57	
	<i>Maximum</i>	3,41	
	<i>Range</i>	1,84	
	<i>Interquartile Range</i>	,36	
	<i>Skewness</i>	-1,383	,137
	<i>Kurtosis</i>	3,806	,272

Extreme Values

			Case Number	Value
EKPPD	<i>Highest</i>	1	215	3,41
		2	91	3,39
		3	26	3,39
		4	121	3,38
		5	304	3,38
<hr/>				
	<i>Lowest</i>	1	125	1,57
		2	18	1,70
		3	102	1,75
		4	109	1,76
		5	275	1,80

Box and Whisker Plot (Box-Plot)



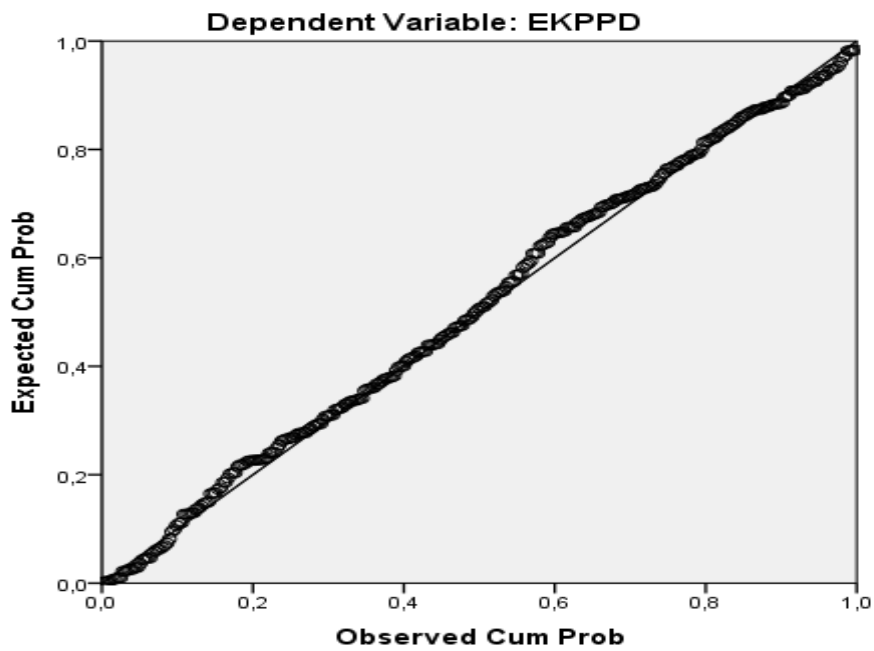
Lampiran 7

Hasil Uji Asumsi Klasik

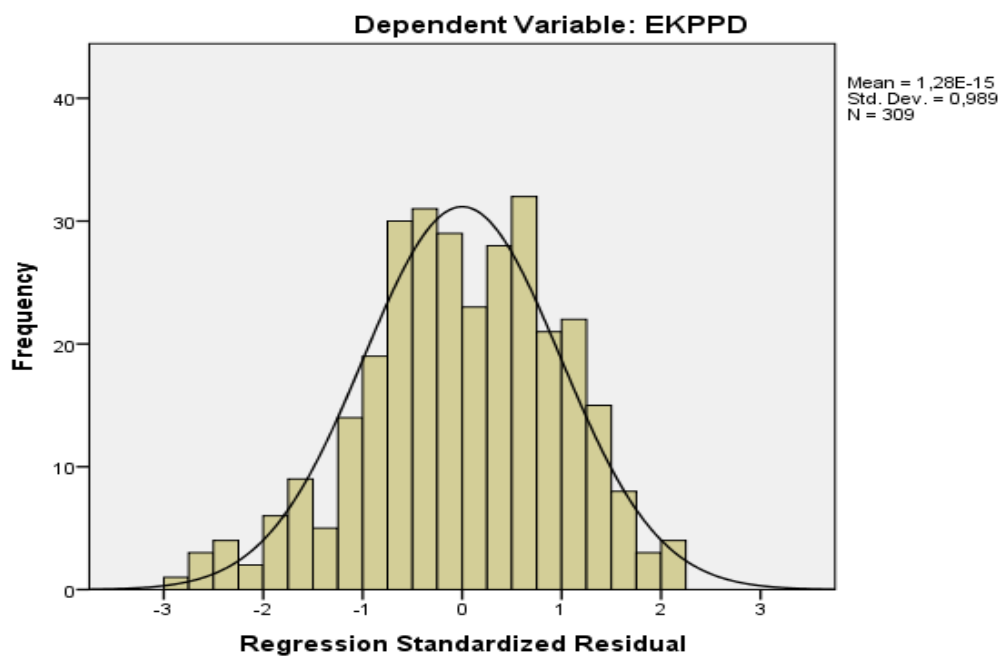
Setelah Outlier Data

1. Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Histogram



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		309
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	,0000000
	<i>Std. Deviation</i>	,17826362
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	,050
	<i>Positive</i>	,022
	<i>Negative</i>	-,050
<i>Test Statistic</i>		,050
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		,064 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

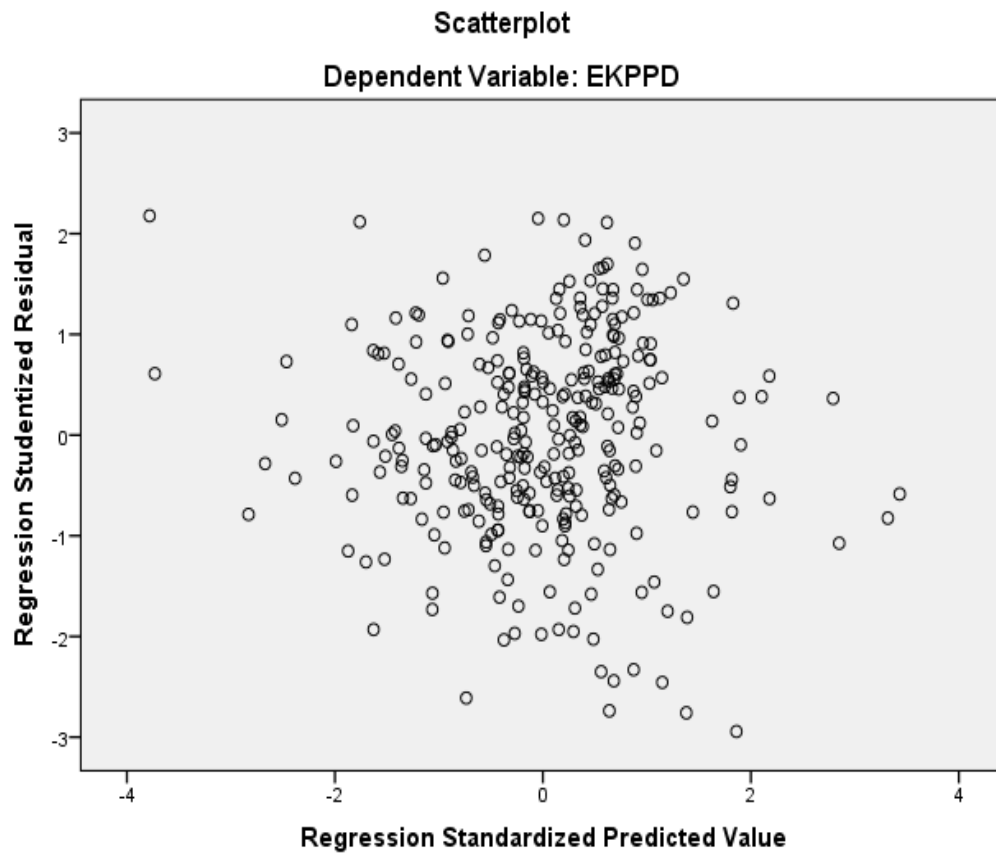
2. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

<i>Model</i>		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>Collinearity Statistics</i>	
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
1	(Constant)	,617	,609			
	TA	,044	,022	,134	,474	2,112
	PAD	,865	,131	,406	,547	1,828
	DAU	,632	,144	,279	,513	1,948
	BM	,461	,193	,122	,782	1,279
	Lev	-,165	,332	-,023	,924	1,082
	DPRD	,004	,001	,158	,560	1,787
	OP	,088	,013	,322	,929	1,077

a. Dependent Variable: EKPPD

3. Uji Heteroskedastisitas



Lampiran 8

Hasil Uji Hipotesis

1. Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,616 ^a	,380	,365	,1803245

a. Predictors: (Constant), TA, PAD, DAU BM, LEV DPRD, OP

b. Dependent Variable: EKPPD

2. Uji Parsial (Uji t)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,617	,609		1,013	,312
	TA	,044	,022	,134	2,031	,043
	PAD	,865	,131	,406	6,611	,000
	DAU	,632	,144	,279	4,399	,000
	BM	,461	,193	,122	2,384	,018
	Lev	-,165	,332	-,023	-,498	,619
	DPRD	,004	,001	,158	2,611	,009
	OP	,088	,013	,322	6,827	,000

a. Dependent Variable: EKPPD

3. Uji Simultan (Uji f)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5,991	7	,856	26,319	,000 ^b
	Residual	9,788	301	,033		
	Total	15,778	308			

a. Dependent Variable: EKPPD

b. Predictors: (Constant), OP, Lev, BM, PAD, DPRD, DAU, TA